



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.627, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Renstra.
2010-2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ruang lingkup rencana pembangunan jangka menengah Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014.

Pasal I

- (1) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 diubah dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
I INDONESIA

NOMOR : 46 Tahun 2011

TANGGAL : 28 September 2011

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014

I. PENDAHULUAN

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014. Penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 Tahap kedua tahun 2010-2014, yaitu *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri lima tahun kedepan.

Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-2014, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; serta UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi Revisi Renstra pada Tahun 2011, Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan;
- BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, yang berisi Penugasan RPJMN serta Arah Kebijakan dan Strategi;
- BAB IV : PENUTUP, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

1.1 REVISI RENSTRA PADA TAHUN 2011

Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 pada tahun 2011 dilakukan sebagai tindak lanjut atas perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Revisi dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Implikasi dari perubahan struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak hanya merubah nomenklatur beberapa jabatan Eselon I hingga Eselon IV, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsinya serta jumlah unit kerja Eselon II hingga

Eselon IV, dalam kerangka mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu penyempurnaan dalam pelaksanaan revisi ini mengakomodasikan pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Kementerian Dalam Negeri saat ini serta proyeksinya hingga tahun 2014.

Lingkup revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 difokuskan kepada penyesuaian penugasan dan target kinerja pada masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya mengikuti struktur organisasi yang baru, sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja yang dimandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam periode KIB II, yaitu tetap menjaga konsistensi terhadap target kinerja dalam Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri KIB II serta Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2010-2014 dinilai masih relevan sebagai koridor arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri hingga Tahun 2014.

Pelaksanaan revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *Pertama* aspek struktural kelembagaan dan *Kedua* aspek substantif kelembagaan menyangkut target dan pendanaan pembangunan. Pendekatan pertama menyempurnakan nomenklatur kegiatan mengikuti struktur organisasi yang baru. Selanjutnya pada pendekatan kedua dilakukan penyempurnaan terhadap target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, berupa penataan kembali pencapaian *output* dan *outcome* (*goal setting*), indikator pengukuran (*measurement setting*), serta kualitas target capaian tahun 2011 hingga tahun 2014 (*target setting*).

1.2 KONDISI UMUM

Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan dalam negeri tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005-2009), kondisi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat berbagai agenda dan kebijakan, baik Nasional maupun Kementerian Dalam Negeri yang telah dapat diselesaikan. Namun sejalan dengan hal tersebut, masih terdapat pula agenda dan kebijakan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri dalam tatanan ketatanegaraan secara berkelanjutan.

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait aspek penguatan integrasi nasional, mencakup: penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, penanganan konflik, pembinaan kerukunan beragama, serta pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, sejak tahun 2005-2009 telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui program kerjasama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba, forum dialog yang melibatkan berbagai pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan peningkatan kohesifitas masyarakat dan pembinaan kerukunan umat beragama. Selain itu, guna mendukung proses kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, telah diterbitkan beberapa instrumen regulasi sebagai pedoman operasional, serta panduan pelaksanaan dalam rangka Pengembangan Pola Pemantapan Ketahanan Bangsa.

Kedepan, perlu dilakukan reorientasi terhadap konsep dan strategi penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sejalan dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu dirumuskan strategi penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan/mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa. Upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Disamping itu, dalam upaya mencegah kerawanan sosial yang dapat mengarah pada timbulnya konflik, pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat, terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi Institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah.

Dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokratisasi di Indonesia ditunjukkan dengan berkembangnya kebebasan mengemukakan pendapat, baik di tingkat nasional maupun lokal, sehingga terjadi proses penguatan masyarakat (*civil society*). Kedepan, tuntutan demokratisasi yang diprediksi akan semakin menguat akan membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi di masa mendatang.

Kelembagaan demokrasi yang kokoh dan didukung oleh stabilitas nasional adalah kunci bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi merupakan landasan kehidupan sosial politik, untuk itu pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap. Secara umum, perkembangan demokrasi selama lima tahun terakhir sebagaimana tercermin dari perbaikan proses penyelenggaraan Pemilu dan meningkatnya partisipasi politik rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya sejumlah partai politik nasional dan lokal pada tahun 2008 yang ikut dalam Pemilu tahun 2009, serta terlaksananya agenda politik nasional, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Pada tingkat lokal, partisipasi politik masyarakat juga relatif cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada.

Hal penting yang dicapai terkait dengan penyempurnaan landasan struktural pada Aspek Politik adalah diselesaikannya paket regulasi undang-undang bidang Politik, meliputi: UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Melalui lima paket undang-undang bidang politik tersebut telah dibangun satu sistem politik dan pemerintahan yang demokratis, yaitu dengan instrumen *parliamentary threshold* (PT) yang diarahkan untuk mengembangkan sistem multipartai sederhana dalam rangka memperkuat penerapan sistem pemerintahan presidensial.

Kecenderungan meningkatnya partisipasi politik sebagaimana dimaksud diatas belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan di bidang infrastruktur politik terkait dengan kapasitas organisasi partai politik. Oleh karenanya perlu terus didorong pengembangan peran dan

penguatan kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan pendidikan politik. Selain itu masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyelenggaraan negara masih perlu terus didorong melalui pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, penataan perangkat regulasi pendukungnya, termasuk penyusunan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain: telah terbangunnya kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

Selanjutnya, penanganan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas kebijakan dalam lima tahun terakhir, baik perbatasan antar negara maupun perbatasan antar daerah. Terkait penanganan wilayah perbatasan antar negara, telah dilakukan berbagai upaya, baik dari segi *security* (seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan simbol-simbol negara, serta perundingan dengan negara tetangga), maupun dari segi *prosperity* (seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar). Berdasarkan kondisi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah terus melanjutkan penegasan batas antar negara melalui pendekatan bilateral kerjasama pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga, serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi. Khusus penanganan daerah di wilayah perbatasan antar negara pengelolaannya kedepan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selanjutnya terkait penanganan perbatasan antar daerah, upaya yang terus dilakukan adalah memetakan penegasan segmen batas daerah. Disamping itu kebijakan dan upaya terkait lainnya dibidang pemerintahan umum adalah perlu ditingkatkannya penguatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, guna membangun

sinergitas pusat-daerah serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka memperkuat NKRI.

Isu strategis yang tidak kalah pentingnya pada aspek pemerintahan umum adalah terkait dengan masalah kependudukan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan *data base* kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

Dari aspek desentralisasi dan otonomi daerah, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud, ditandai dengan membaiknya pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralistik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah secara umum, serta penataan kewenangan, penataan daerah otonom, pemilihan kepala daerah, penguatan otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan pengelolaan keuangan daerah, serta Penguatan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Secara umum penyelenggaraan otonomi daerah menunjukkan peningkatan pelayanan masyarakat, baik di bidang administrasi, prasarana dan sarana, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan penguatan ketahanan pangan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 mengalami banyak kemajuan, namun perlu tetap disadari bahwa perjalanan ke arah pelaksanaan yang optimal masih membutuhkan serangkaian usaha perbaikan, diantaranya melalui revisi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi 3 (tiga) undang-undang yang terdiri dari: UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa, dan UU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu gejala menonjol sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi adalah aspirasi pembentukan daerah otonom baru yang berkembang pesat dengan jumlah saat mencapai 530 daerah otonom yang terdiri dari 33 Provinsi dan 398 Kabupaten, 93 Kota, 5 Kota administratif dan 1 Kabupaten administratif. Terkait dengan hal ini, telah dilakukan upaya penataan dan peningkatan kapasitas daerah otonom dengan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping itu, saat ini sedang disusun *Grand Strategy* Penataan Daerah (GSPD) sebagai acuan dalam rangka penataan daerah kedepan hingga tahun 2025 yang mencakup penentuan jumlah ideal daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota, penyempurnaan terhadap persyaratan dan tatacara pembentukan daerah otonom baru, serta evaluasi secara terprogram dan pola pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Kedepan, pembentukan daerah otonom diupayakan lebih obyektif, mengingat setiap terbentuknya daerah otonom akan menimbulkan implikasi terhadap beban keuangan negara berupa penyediaan dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), penyediaan sarana dan prasarana perangkat pusat dan daerah.

Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah dilaksanakan Pilkada secara langsung sebanyak 484 Pilkada dimulai sejak Juni 2005 sampai Agustus tahun 2009, dan telah dilaksanakan pula Pilkada sebanyak 294 Pilkada mulai September 2009 hingga Juli 2011. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara umum dapat berjalan dengan tertib dan lancar hingga dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, meskipun tidak dipungkiri juga masih menyisakan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Oleh karena itu, kedepan perlu dirumuskan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memperlancar proses penyelenggaraan Pilkada. Terkait dengan Pilkada ini, telah diantisipasi pula terhadap kemungkinan terjadinya keadaan genting yang disebabkan bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh wilayah atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengakibatkan Pilkada tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan otonomi khusus dan daerah istimewa, yakni dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Secara umum, pelaksanaan otonomi khusus dan daerah istimewa telah menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Kondisi pemerintahan dan masyarakat Aceh dan Papua saat ini cukup kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya

terkait penanganan gangguan keamanan dan ketertiban, fasilitasi peningkatan hubungan dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota, antar provinsi dan antar kabupaten/kota, serta antar lembaga terutama antara eksekutif dan legislatif, disamping upaya penciptaan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana otonomi khusus yang ditransfer ke daerah.

Sehubungan dengan pengaturan Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang disusun RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra ini, pengaturan dimaksud telah dapat diselesaikan. Sementara itu, telah pula ditetapkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Pemerintah juga sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaan lainnya berupa RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Kerjasama Penyusunan Tata Ruang Terpadu dan RPP tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan diimplementasikannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, akan berimplikasi pula dengan pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tiga kegiatan utama, yakni penataan regulasi di bidang keuangan daerah, fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan-kegiatan dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, telah dilaksanakan antara lain melalui evaluasi Raperda tentang APBD Provinsi, sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis dalam rangka implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, telah pula dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pembinaan pengelolaan dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, telah dikembangkan juga Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang layak direplikasi pada seluruh daerah di Indonesia melalui dukungan dana APBD.

Terkait dengan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus, penyusunan rancangan kebijakan otonomi daerah, dan kebijakan perimbangan keuangan. Sampai saat ini DPOD sudah menjalankan fungsinya terutama dalam proses pembentukan daerah otonom, pengelolaan aset dan P3D, penyusunan

standar pelayanan minimal, disamping pertimbangan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan perhitungan dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam, serta penentuan formula dan perhitungan DAU dan DAK.

Dari aspek pembangunan daerah, isu yang menonjol adalah terkait kesenjangan antar daerah/wilayah/kawasan dan peningkatan perekonomian daerah, yang diindikasikan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah. Berbagai perbedaan kebijakan antara Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin besar antara daerah miskin dan daerah kaya. Sementara itu, dengan meluasnya regionalisasi perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar bersama yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi, telah mendorong kompetisi bagi daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, peluang dan peran daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya semakin terbuka, karena berbagai kewenangan telah diberikan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Kewenangan otonomi daerah yang luas akan memberikan banyak keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan segala potensi daerah yang dimilikinya melalui hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional.

Selama lima tahun terakhir telah dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi kepada seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*, serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka fasilitasi penataan ruang dan lingkungan hidup di daerah, telah ditetapkan berbagai regulasi dan kegiatan fasilitasi daerah. Upaya-upaya kedepan lebih diarahkan pada percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemanfaatan ruang daerah, mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan daerah sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Di bidang pengembangan perkotaan, telah ditetapkan berbagai regulasi dan kegiatan fasilitasi daerah. Kedepan, Kementerian Dalam Negeri terus akan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan sesuai karakteristik masalah dan kebutuhan masyarakat perkotaan, serta mengendalikan lingkungan pemukiman di wilayah perkotaan dalam rangka mencegah berkembangnya lingkungan kumuh perkotaan,

termasuk dalam aspek penanganan secara efektif masalah sampah pada areal pemukiman perkotaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten di sekitar wilayah perkotaan.

Percepatan penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah, termasuk diantaranya di wilayah perbatasan. Kedepan penajaman agenda pengembangan daerah diarahkan dalam upaya peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian pada wilayah tertinggal/terpencil, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara tetangga, daerah rawan bencana, dan kawasan khusus, agar tidak jauh tertinggal dengan daerah-daerah lainnya. Disamping itu perlunya ditingkatkan upaya-upaya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi perekonomian daerah pada wilayah lintas daerah, agar terwujud pertumbuhan perekonomian bersama antar daerah dan mencegah terjadinya kesenjangan kemajuan ekonomi antar daerah.

Dari aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan perkuatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Terkait dengan penataan dan penguatan otonomi desa, telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan, antara lain: pemantapan kerangka aturan/regulasi, pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan keuangan desa, serta pemantapan administrasi pemerintahan desa. Sementara itu, penguatan pemerintahan desa dilakukan melalui fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa berupa penyusunan instrumen program pengembangan kapasitas pemerintahan desa, serta orientasi, bimbingan teknis, dan pelatihan manajemen pemerintahan desa.

Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan Kecamatan/PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program pemberdayaan ini menunjukkan hasil yang positif, jika dilihat dari realisasi pembangunan fisik, perguliran dana modal usaha, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek pembinaan aparatur, kebutuhan penerapan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik semakin menguat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel di semua tingkatan pemerintah. Dalam konteks ini, kedepan, reformasi birokrasi secara khusus memberikan perhatian pada pembinaan aparatur dalam rangka tata pemerintahan yang baik menuju aparatur yang profesional dan berdaya saing. Hal ini dilakukan karena masih ada sinyalemen kurang optimalnya sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Pembinaan aparatur dalam rangka reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik diarahkan pada penataan dan pengembangan sistem pengelolaan aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penguatan pembinaan dan pengawasan pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Penataan dan pengembangan kompetensi aparatur diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masing-masing.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Potensi dan Peluang

Potensi utama Kementerian Dalam Negeri adalah keberadaan kelembagaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan dalam negeri guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keberadaan Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, serta Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang bertanggung jawab

dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang meliputi politik dalam negeri, kesatuan bangsa, pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan daerah, administrasi kependudukan, serta pembangunan masyarakat desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan dalam bidang-bidang tersebut kepada seluruh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kejelasan kedudukan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan kekuatan utama Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri.

Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya. Potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Aspek penguatan integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi bangsa. Oleh karena itu integrasi nasional perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus. Dengan perannya dalam menjaga integritas nasional dan kesatuan bangsa, Kementerian Dalam Negeri memiliki peluang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan integrasi nasional dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya peningkatan wawasan kebangsaan serta upaya penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini.
- b. Aspek politik dalam negeri. Kedewasaan bangsa dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh. Hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik. Sebagai pembina politik dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya pemantapan stabilitas politik dalam negeri dengan melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi serta pengembangan budaya politik baik kepada lembaga-lembaga politik maupun kepada masyarakat luas.
- c. Aspek pemerintahan umum. Sebagai institusi yang mendapat mandat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan

pembinaannya, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan umum dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayahnya, fasilitasi ketetraman dan ketertiban umum, penanganan dan mitigasi bencana, serta melakukan penataan administrasi kependudukan.

- d. Aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri memiliki peranan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan perannya tersebut, Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemantapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Sejalan dengan itu Kementerian Dalam Negeri melanjutkan upaya melakukan penataan regulasi dan urusan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, penataan daerah otonom, penguatan terhadap daerah yang memiliki otonomi khusus dan daerah istimewa, serta melakukan upaya-upaya pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Aspek pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam konteks ini Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan dibidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam bidang tersebut. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri perlu melanjutkan upaya pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dalam kerangka itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah, memberikan fasilitasi dana penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan.
- f. Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, otonomi desa perlu dikembangkan agar mampu menjadi wadah bagi pemenuhan kepentingan masyarakat tersebut. Pada sisi lain, sejalan

dengan otonomi desa diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali setiap permasalahan yang dihadapinya dan menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya. Karena itu upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sejalan dengan penguatan otonomi desa. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dapat melanjutkan upaya penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong serta meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri dapat pula melakukan upaya penataan terhadap otonomi desa, penataan dan penguatan terhadap pemerintahan desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

- g. Aspek pembinaan aparatur. Penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah membutuhkan aparatur handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi. Terkait dengan itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap lembaga Kementerian Dalam Negeri sendiri maupun terhadap pemerintah daerah. Selain itu Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas kementerian, melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik, melakukan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan dan politik dalam negeri, melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, serta menyelenggarakan pendidikan kedinasan dalam rangka penyediaan dan pengembangan kader sumber daya manusia aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Permasalahan dan Tantangan

Selain memiliki potensi dan peluang, Kementerian Dalam Negeri juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2010-2014, baik pada Aspek penguatan integrasi nasional, Aspek politik dalam negeri, Aspek pemerintahan umum, Aspek desentralisasi dan otonomi daerah, Aspek pembangunan daerah, Aspek pemberdayaan masyarakat, serta Aspek pembinaan aparatur. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

a. Aspek penguatan integrasi nasional. Sebagai bangsa yang pluralis, kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi nasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

- 1) Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
- 2) Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.
- 3) Menguatnya sikap primordialisme dan terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
- 4) Masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.
- 5) Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang

ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi Negara dan memperdebatkan kembali UUD 1945.

- b. Aspek politik dalam negeri. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas. Tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah membangun budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam pembinaan politik dalam negeri:

- 1) Eforia reformasi yang masih kuat, yang menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi.
- 2) Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
- 3) Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
- 4) Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.

- c. Aspek pemerintahan umum. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun yang akan datang terkait dengan Aspek pemerintahan umum mencakup permasalahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum maksimalnya proses penataan pemerintahan dan hubungan antar strata pemerintahan pusat-daerah dan antar daerah sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kerjasama antar Daerah juga belum optimal karena masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah yang

membidangi kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

- 2) Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sifatnya sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas, bahkan beberapa pulau tersebut tidak berpenghuni, dan cenderung memiliki potensi konflik dengan negara tetangga.
 - 4) Masih adanya konflik perbatasan antar daerah.
 - 5) Masalah administrasi kependudukan, diantaranya kemampuan memberikan pelayanan bidang administrasi kependudukan belum optimal, daerah-daerah belum sepenuhnya menerapkan SIAK, pemanfaatan *database* kependudukan sebagai hasil dari SIAK belum optimal, adanya regulasi yang tumpang-tindih, pengelolaan Nomor Identitas Tunggal, pemahaman dan penegakan hukum masih sangat lemah, serta banyaknya kendala dalam penerapan SIAK.
 - 6) Belum efektifnya manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah Daerah terhadap pengurangan resiko bencana sebagai prioritas pembangunan daerah, belum optimalnya kelembagaan penanganan bencana di daerah, serta rendahnya kemampuan sumber daya yang tersedia di Daerah dalam mengidentifikasi potensi bencana dan langkah-langkah mitigasi bencana.
- d. Aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang desentralisasi dan otonomi daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
- 1) Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan penafsiran peraturan

perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-undangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal.

- 2) Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM, dan belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM.
- 3) Belum maksimalnya penataan daerah. Grand Strategy Penataan Daerah (GSPD) sebagai acuan dalam rangka penataan daerah operasional sepenuhnya. Pada sisi lain, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih rendah, serta masih banyak daerah yang perlu dibina dan ditingkatkan kapasitas Daerahnya.
- 4) Masih banyaknya permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti kurang akuratnya data pemilih tetap (DPT), persyaratan calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah), permasalahan internal Parpol dalam hal pengusulan pasangan calon, adanya dugaan KPUD tidak independen, adanya dugaan *money politics*, pelanggaran kampanye, maupun penghitungan suara yang dianggap tidak akurat. Dalam hal lain, terdapat pula masalah sengketa Pilkada yang harus diselesaikan hingga ke Mahkamah Konstitusi.
- 5) Masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian besar daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap untuk belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga mengabaikan kelestarian

lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat memperebutkan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada terjadinya disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban masyarakat dan memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

e. Aspek pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

- 1) Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan Daerah.
- 2) Penataan ruang dan lingkungan hidup yang masih belum maksimal. Masih banyak Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan namun tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Masih terjadi tumpang tindih penanganan pemanfaatan sumber daya alam, masih terjadi umpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang antara beberapa sektor seperti pertambangan dan kehutanan, antara non pertanian dengan pertanian dan lainnya. Koordinasi antara tingkat pemerintahan serta instansi terkait di daerah mengenai tata ruang belum maksimal. Kelembagaan pengelola penataan ruang belum didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal serta belum ditunjang dengan penggunaan teknologi dan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan faktual. Peran masyarakat dalam penataan ruang (proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) juga masih lemah, demikian pula pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pada sisi lain terdapat pula masalah penurunan kualitas lingkungan karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Dihadapkan kepada keterbatasan PAD, sumberdaya alam di daerah sering dieksploitasi melebihi daya dukungnya.
- 3) Pengembangan perekonomian daerah yang belum optimal. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, demikian pula kesenjangan antar lapisan masyarakat. Pembangunan wilayah perdesaan juga belum maksimal, akibatnya tingkat kesejahteraan

penduduk pedesaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pengembangan perekonomian daerah juga belum mengarah pada penciptaan daya saing daerah.

- 4) Masih adanya ketimpangan/kesenjangan yang tajam antar daerah, seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah geografis, ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, maupun ketimpangan pada aspek-aspek non-pendapatan seperti pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun akses terhadap infrastruktur. Ketimpangan antar daerah juga terkait dengan kurang maksimalnya upaya pengembangan wilayah-wilayah yang belum berkembang, seperti wilayah yang terletak di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, dan kawasan khusus.
- 5) Pengelolaan perkotaan yang masih belum terpadu. Masalah ini ditandai dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya tingkat penyediaan perumahan yang layak, rendahnya akses terhadap lahan perkotaan, tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan, menurunnya daya dukung kota besar dan metropolitan akibat pembangunan yang tidak terkendali, belum maksimalnya peran kota kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan wilayah, serta rentannya kota-kota di Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
- f. Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
 - 1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
 - 2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - 3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya

akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

- g. Aspek pembinaan aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan pada aspek pembinaan aparatur adalah:
- 1) Belum maksimalnya penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian.
 - 2) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan.
 - 3) Organisasi dan tata kerja yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang "*right size*" sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi. Proses ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri secara efektif dan efisien.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sistem Politik Demokratis**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
2. **Pemerintahan Desentralistik**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Pembangunan Daerah**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
4. **Keberdayaan Masyarakat**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
5. **Sumber Daya Aparatur yang Profesional** merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif.
6. **Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya

mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

2.2 M I S I

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

2.3 TUJUAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:

- T1: Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
- T2: Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
- T3: Terciptanya tertib administrasi kependudukan;

- T4: Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik;
- T5: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah;
- T6: Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;
- T7: Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- T8: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; serta
- T9: Meningkatkan kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

2.4 SASARAN

Lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014 yang merupakan derivasi dari masing-masing tujuan diatas, masing-masing:

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - T1S1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
 - T1S2: Meningkatkan Komitmen Pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - T1S3: Meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
 - T1S4: Meningkatkan kesadaran Warga Negara dalam partisipasi Politik.
2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - T2S1: Meningkatkan dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
 - T2S2: Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;

- T2S3: Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
- T2S4: Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi;
- T2S5: Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas;
- T2S6: Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah; dan
- T2S7: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana-prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana;
3. Untuk mencapai tujuan pada T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- T3S1: Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- T3S2: Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- T3S3: Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- T3S4: Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- T3S5: Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
- T3S6: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
4. Untuk mencapai tujuan pada T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- T4S1: Meningkatnya implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
- T4S2: Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- T4S3: Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru dan tersusunnya Strategi Dasar Penataan daerah (SDPD/*grand strategy*);
- T4S4: Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
- T4S5: Tersusunnya UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien; dan
- T4S6: Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.
5. Untuk mencapai tujuan pada T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
- T5S1: Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD;

T5S2:Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

T5S3:Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah.

6. Untuk mencapai tujuan pada T6, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T6S1:Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

T6S2:Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;

T6S3:Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH);

T6S4:Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

T6S5:Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis;

T6S6:Peningkatan Private Public Partnership;

T6S7:Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;

T6S8:Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum; dan

T6S9:Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum

7. Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T7S1:Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

T7S2:Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;

T7S3:Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;

T7S4:Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

T7S5:Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan

T7S6:Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

8. Untuk mencapai tujuan pada T8, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T8S1: Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;

T8S2: Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan Diklat;

T8S3: Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

T8S4: Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.

9. Untuk mencapai tujuan pada T9, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

T9S1: Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri;

T9S2: Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

T9S3: Terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri;

T9S4: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri;

T9S5: Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan; dan

T9S6: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas disajikan dalam Tabel 1. Matriks Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan.

Tabel 1
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Jangka Menengah dan Tahunan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh nilai Pancasila dan semangat dan nilai UUD45 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.	1. Pervujudan pemilu demokratis dengan pilar penyelenggara pemilu yang profesional, imparial, dan bertanggung jawab. 2. Penguatan kelembagaan politik. 3. Partisipasi politik masyarakat. 4. Persentase Penurunan kasus Konflik SARA.	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).	1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK-15)	1. 1 Dokumen RUU Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15) PB) 2. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik (KK 14) (PB) 3. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14) (PB) 4. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) (PB) 5. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) (PB)	1. 1 Dokumen RUU Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15) PB) 2. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik (KK 14) (PB) 3. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14) (PB) 4. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) (PB) 5. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) (PB)	1. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14) (PB) 2. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) (PB) 3. 1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, DPRD (KK 14) (PB)	-	-
				2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi (PB)	52,3	66	68	-	70

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.	Tingkat sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.	Meningkatnya komitmen Pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil. (PB)	-	-	-	3	-
				4. Indeks Kebebasan Sipil (PB)	75,7	78	79	-	80
				5. Indeks Hak-Hak Politik (PB)	53	66	68	-	70
				1. Persentase kebijakan/peraturan perundang-an yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan (PB)	-	70 %	75 %	80 %	80%
				1. Persentase forum dialog publik yang efektif (PB)	-	70 %	75%	80 %	80%
2.	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.	Tingkat sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.	Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi Politik.	1. Prosentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI).	65%	70%	72,5 %	75%	80%
				1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. (KK 16 1)	10 kabupaten/kota di 6 provinsi (1 Permendagri)	20 kabupaten/kota di 6 provinsi	20 kabupaten/kota di 6 provinsi	25 kabupaten/kota di 6 provinsi	25 kabupaten/kota di 6 provinsi
				1. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang	10%	15%	15%	20%	20%
				2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka					

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
			harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan. (PN 1.3)	ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)					
				2. Jumlah pemetaan dan pemutakhiran data kerjasama daerah. (PB)	-	-	1 paket	1 paket	1 paket
				3. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)	10	10	10	12	14
				4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. (PB)	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi
			3. Meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan antar negara. (PN 5.1)	1. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat saipras perbatasan antar negara (PN)	8	10	15	17	20
				2. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG (PN)	6 provinsi	7 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	6 provinsi
			4. Meningkatkan penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi.	1. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (PB)	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Terciptanya terbit administrasi kependudukan.	1. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap ketertiban	1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan (PN-1.4)	2. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota	-	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah
				3. Persentase pemetaan rubabumi (toponimi) (PB)	15%	35%	55%	75%	100%
				1. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan	-	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	3 Provinsi
				2. Persentase daerah yang mempunyai aparat Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar	-	20%	60%	80%	70%
				1. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus	-	7 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	8 Daerah
				1. Persentase fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK	75%	75%	75%	75%	75%
				1. Jumlah Kabupaten/Kota yang database kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional.	329 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
		pelayanan dokumen kependudukan.		2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal. (KK 6.1)	329 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota
				3. Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan Pemutakhiran data base kependudukan Kabupaten/ Kota. (KK 6.2)	329 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/ Kota
				4. Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara on-line. (KK 6.3)	329 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota	497 Kabupaten/ Kota
	2. Persentase penduduk yang telah diberikan NIK.		2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk. (PN-1.4)	1. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. (PN)	329 kabupaten/ kota	497 kabupaten/ kota	497 kabupaten/ kota	497 kabupaten/ kota	497 kabupaten/ kota
			3. Terciptanya koneksi NIK dengan identitas kependudukan. (PN-1.4)	1. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik (PB).	4 K/L	4 K/L	9 K/L	15 K/L	15 K/L

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Administrasi secara terintegrasi dan utuh. (KK 6.5)	Kabupaten/Kota 329	Kabupaten/Kota 497	Kabupaten/Kota 497	Kabupaten/Kota 497	Kabupaten/Kota 497
				3. Jumlah Kabupaten/Kota yg melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah. (KK 6.6)	-	197 Kabupaten/Kota	300 Kabupaten/Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/Kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/Kota
				4. Jumlah SDM yang disediakan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SIAK dan Petugas registrasi. (KK 6.7)	-	9.392 petugas	15.544 petugas	-	-
				5. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional. (KK 6.8)	-	197 kabupaten/kota	-	-	-
				6. Jumlah penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari (KK 6.4) (PN)	-	67,95 juta penduduk 197 Kabupaten/Kota	105 juta penduduk di 300 Kabupaten/Kota	-	-
		3. Jumlah Pemda (Kabupaten/Kota) yang memiliki Perda tentang administrasi Kependudukan.	4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan.	1. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (PB)	127 Kabupaten/Kota	250 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			5. Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.	1. Persentase Pemda (kabupaten/ kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan.	-	-	15%	35%	65%
			6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.	1. Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat. (KK 6.9)	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota	497 Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Desentralistik.	1. Jumlah implementasi 31 bidang urusan pemerintahan daerah dan 17 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	1. Meningkatkan Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. (PN 1.3)	1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh K/L (PB)	5 Bidang urusan	18 bidang urusan	22 bidang urusan	26 bidang urusan	31 bidang urusan
				2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah. (PN)	5 SPM	10 SPM	15 SPM	15 SPM Sektor termontor dalam penerapannya	15 SPM Sektor terevaluasi dalam penerapannya
				1. Jumlah provinsi/kab/kota Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi	26 Provinsi usia diatas 10 tahun	28 Provinsi usia diatas 10 tahun	30 Provinsi usia diatas 10 tahun	32 Provinsi usia diatas 10 tahun	33 Provinsi usia diatas 10 tahun
				Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.	293 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun	393 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun	443 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun	541 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun	568 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun
					5 Provinsi Otsus	5 Provinsi Otsus	5 Provinsi Otsus	5 Provinsi Otsus	5 Provinsi Otsus
					74 Kabupaten/Kota Otsus	74 Kabupaten/Kota Otsus	74 Kabupaten/Kota Otsus	74 Kabupaten/Kota Otsus	74 Kabupaten/Kota Otsus
					148 DOB diatas 3 s/d 10 tahun	128 DOB diatas 3 s/d 10 tahun	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun
					100%	100%	100%	100%	100%
			3. Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru dan Tersusunnya Strategy Dasar Penataan daerah (SDPD/Grand Strategy). (PN 1.1a)	1. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi (KK 1.1) (PN)					
				2. Persentase penyusunan SDPD/Grand Strategy (KK 1.3) (PN)	100%				

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
						1 UU			
			4. Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya.	1. Jumlah Dokumen revisi UU No.32 Tahun 2004. (KK 1.2) (PN) 2. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah (PB)	-	1 UU	40%	60%	100%
			5. Tersusunnya UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien. (PN 1.1.c)	1. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: a) Revisi terbatas UU No.32 thn 2004 (KK 2.1) (PN) b) Kajian mengenai Gub. (KK 2.2) c) Kajian terkait posisi dan pemilihan Wakil KDH. (KK 2.3) d) UU tentang Pemilu KDH dan Wakil KDH. (KK 2.4) (PN)	1 UU (Revisi terbatas UU 32 2004) 1 Dokumen 1 Dokumen	1 UU (Pemilu KDH dan WKDH)			
			6. Terwujudnya harmonisasi peraturan perUUan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap. (PN 1.2)	1. Persentase inventarisasi per-UU-an sektor yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah. (KK 11.1) (PB) 2. Persentase peraturan per-UU-an yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 11.2) (PB)	100%	100%	100%	100%	100%
					20%	30%	40%	50%	60%

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
5.	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan investasi dan kemampuan fiskal daerah.	Persentase daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan daerah yang porsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung, serta tersedianya kajian revisi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.	1. Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD. (PN-1.1b)	1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (PN) 2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung (KK 3.1) (PN) 3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN) 4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN) 5. Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi se-Indonesia (PN) 6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian lembaga (PN) 7. Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK (PN)	15% dari seluruh provinsi, dan kabupaten/kota	30%	50%	75%	100%
					30%	40%	50%	55%	60%
					40%	60%	70%	80%	90%
					60%	70%	80%	85%	90%
					26%	27%	28%	29%	30%
					70%	90%	95%	100%	100%
					70%	75%	80%	85%	90%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.	1. Tingkat ketersediaan data, informasi dan peta pertumbuhan. 2. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemrioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah.	2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai Revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (KK 3.2) (PB)	1 paket	-	-	-	-
			3. Tersedianya Peraturan yang mendukung Investasi di Daerah.	1. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. (KK 17)	1 Permendagri	-	-	-	-
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	1. Tingkat kesesuaian antara RPJPD dengan RPJPN; RPJMD dengan RPJMN; RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan RKP; KUA, PPAS, APBD dengan RKPD provinsi.	20%	40%	60%	80%	90%
			2. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah.	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.	60%	90%	90%	100%	100%
			3. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH).	1. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemrioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi	2	6	8	10	10

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya.					
			4. Meningkatkan kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Persentase daerah yang mengimple-mentasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	50%	60%	75%	85%	100%
			5. Terlaksananya imple-mentasi Sistem Pelayan- an Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di be-be-rapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis. (PN-4.2)	1. Jumlah daerah yang membentuk PTSP. (KK-12) (PN) 2. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SPIPISE (KK-12) (PN) 3. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE (KK-12) 4. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP. (KK-12) (PB) 5. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha (KK-12) (PB)	143 Kab/ Kota - - - 100%	212 kab/ Kota 153 Kab/ Kota 153 Kab/ Kota 100%	265 Kab/ kota 212 Kab/ Kota 212 Kab/ Kota 100%	318 Kab/ Kota 265 Kab/ Kota 265 Kab/ Kota 100%	371 Kab/ Kota 318 Kab/ Kota 318 Kab/ Kota 100%
					30%	40%	50%	60%	70%

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
			6. Peningkatan Private Public Partnership. (PN-4.2)	1. Persentase Kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Prov, Kabupaten/Kota di Indonesia (KK 5.1)	100%	-	-	-	-
				2. Jumlah PTSP dengan kinerja baik	-	100 Kab/Kota	125 Kab/Kota	150 Kab/Kota	175 Kab/Kota
				3. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta (KK 5.2)	-	1 Paket	1 Per-Uuan	1 Per-Uuan	1 Per-Uuan
				4. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			7. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapabilitas Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan perataan ruang bagi rakyat banyak. (PN-3.1)	1. Persentase tersusunya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD. (KK 7.1)	100%	-	-	-	-
				2. Jumlah BKPRD provinsi terrevitalisasi (KK 7.2)	-	15 Provinsi	23 Provinsi	30 Provinsi	33 Provinsi
				3. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov (KK 7.3)	-	15 Prov	33 Prov	-	-
				4. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi (KK 7.4)	40%	100%	-	-	-
				5. Persentase tersusunya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah (KK 7.5)	100%	-	-	-	-

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				6. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang.	70%	100%	-	-	-
			8. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. (PN-3.1)	1. Jumlah Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif (KK 10.1)		23 Prov	26 Prov	30 Prov	33 Prov
				2. Jumlah daerah yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (KK 10.2)	-	15 Prov	23 Prov	30 Prov	33 Prov
				3. Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam perencanaan tata ruang melalui PTSP. (KK 10.3)	30%	40%	60%	75%	100%
				4. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Prov, RTRW Kabupaten/ Kota. (KK 10.4)	1	1	1	1	1
				5. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen (KK 10.5)	50%	70%	80%	90%	95%
			9. Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum. (PN-4.1)	1. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah (KK 16.2)	-	2 Pedoman	-	-	-

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan kebudayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa.	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui BinteK, inventarisasi keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD. 2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan.	15 Provinsi 30 Kabupaten	18 prov 64 Kabupaten	22 Prov 110 Kabupaten	26 Prov 130 Kabupaten	32 Prov 192 Kabupaten
			2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa. 2. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi
			3. Meningkatkan kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.	1. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UEP-SP yang berfungsi. (KK 13.1) 2. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa. (KK 13.1)	33 prov 394 Kabupaten	33 prov 400 Kabupaten	33 prov 415 Kabupaten	33 prov 425 Kabupaten	33 prov 468 Kabupaten
					20 %	35 %	50 %	60 %	70 %
					20 pasar	35 pasar	94 pasar	60 pasar	70 Pasar
			4. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantauan program PNPM-MP. (PN-2.1)	1. Cakupan penerapan PNPM-MP (KK 13.2)	32 provinsi 394 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal	32 provinsi 394 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal	32 provinsi 393 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal	32 provinsi 394 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal	32 provinsi 394 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan (KK 13.2)	2 Kab/ 9 Kecamatan	-	-	-	-
				3. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).	8 provinsi, 23 Kabupaten	8 provinsi, 12 Kabupaten	8 provinsi, 12 Kabupaten	-	-
			5. Meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.	1. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara. 2. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu.	15 Kabupaten	25 Kabupaten	35 Kabupaten	40 Kabupaten	50 Kabupaten
			6. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.	1. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (<i>Jatropha curcas</i> lin). 2. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.	33 prov 468 Kabupaten	33 prov 468 Kabupaten	33 prov 468 Kabupaten	33 prov 468 Kabupaten	33 prov 468 Kabupaten
				1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di	14 desa	28 desa	45 desa	62 desa	80 desa
8.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan	1. Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi keparang prajaan.	1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri.(PB)	20 Posyan-tekdes 80%	40 Posyan-tekdes 80%	60 Posyan-tekdes 80%	80 Posyan-tekdes 90%	100 Posyan-tekdes 90%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kapasitas SDM aparaturnya lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah.	2. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	lingkungan Kemendagri, serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi. (PB)	80%	80%	80%	90%	90%
		3. Persentase peningkatan kompetensi Diklat Teknis, khususnya Teknis Substantif Pemerintahan Daerah, diklat fungsional dan diklat kepemimpinan.		2. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu.	80%	80%	80%	80%	
		4. Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi kecamang-prajaan.		3. Jumlah review Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP (KK.19.1)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		5. Meningkatkan jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparaturnya lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah		4. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.	10 Besar	10 Besar	5 Besar	5 Besar	
				1. Jumlah alumni Diklat.	11.000 alumni	12.000 alumni	13.000 alumni	14.000 alumni	20.000 alumni
		2. Meningkatkan Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat.		2. Persentase meningkatnya jumlah peserta sesuai dengan.	-	70%	75%	80%	85%
				1. Jumlah Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda yang disusun. (KK.8.8)	40 NSPK	90 NSPK	130 NSPK	165 NSPK	190 NSPK
				3. Terlaksananya reformasi diklat aparaturnya lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.					

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
		6. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi kepa-mongprajaan		2. Jumlah naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi. (KK.8.4)	10 naskah	22 naskah	34 naskah	44 naskah	50 naskah
				3. Jumlah modul kediklatan yang terstandar.	94 Modul	154 Modul	226 Modul	298 Modul	358 Modul
				4. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan.	60 %	70%	80%	85%	90%
				5. Jumlah tenaga penyusun standar dan asse-sor kompetensi (KK.8.6)	100 orang	200 orang	275 orang	350 orang	400 orang
				6. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat (KK.8.7)	22 Jabatan	34 Jabatan (K)	34 Jabatan (K)	34 Jabatan (K)	34 Jabatan
				7. Jumlah lembaga diklat yang dipetakan kapasitasnya. (KK.8.5)	5 Lembaga Diklat	10 Lembaga Diklat	28 Lembaga Diklat	38 Lembaga Diklat (K)	-
				8. Jumlah Lembaga diklat yang efektif. (KK.8.9)	-	5 Lembaga Diklat	10 Lembaga Diklat	28 Lembaga Diklat	38 Lembaga Diklat (K)
			4. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.	1. Persentase jumlah lulusan pendidikan kader program vokasi, akademik dan profesi kepa-mongprajaan dengan predikat "Dengan Pujian" dan atau "Cum Laude" (PB).	4% dari jumlah praja	4% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja
				2. Peningkatan rata-rata nilai pengajaran, pelatihan dan penguasaan.	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
9.	Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri	Rencana aksi penataan manajemen dan reformasi birokrasi Kemendagri Opini BPK atas laporan keuangan dan BMN Kemendagri.	1. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri.	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran. (KK-18.1)	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja
					2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)
					1 Permendagri Renstra				1 draf Permendagri Renstra Tahun 2015-2019
					1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan
					2 Permendagri DAK lingkup Kemendagri	2 Permendagri DAK lingkup Kemendagri	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri	1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri
				2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi. (KK-18.2)	5 Dok Laporan Monev	6 Dok Laporan Monev	6 Dok Laporan Monev	6 Dok Laporan Monev	7 Dok Laporan Monev
				3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kemendagri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya. (KK-18.3)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kemendagri dengan penugasan RPJMN 2010-2014. (KK-18.4)	70%	75%	80%	85%	90%
			2. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan Pemda.	1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi	3 pedoman	3 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				2. Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	-	-	-	1 paket
				3. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi Kemendagri.	1 Dokumen blueprint reformasi birokrasi 3 pedoman	3 Pedoman	-	-	-
				4. Persentase Implementasi reformasi birokrasi.	-	65%	70%	80%	100%
				5. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999. (KK 4.1)	1 Dokumen	-	-	-	-
				6. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri.	2 dok Evaluasi	1 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS	1 Dokumen Masukan RUU 2 Dokumen Masukan RPP	-	-
				7. Persentase Daerah yang menyusun roadmap reformasi birokrasi.	1 Dokumen blueprint reformasi birokrasi 3 pedoman	3 Pedoman	3 Pedoman	4 Lap. Money	2 Pedoman
				8. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah. (KK 4.2)	-	100%	-	-	-
				9. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS. (KK 4.3)	-	-	100%	-	-
				10. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan Fungsional bagi PNSP di lingkungan Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				11. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaaan CPNS Kemendagri (KK.8.1)	50%	100%	-	-	-
				12. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (KK.8.2)	100%	-	-	-	-
				13. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD. (KK.8.3)	1 Dokumen RPP	-	-	-	-
				14. Persentase PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi	50%	60%	65%	70%	75%
			3. Terlaksananya harmonisasi Perda & program legislasi lingkup Kemendagri (PN-1.2)	1. Jumlah Perda Yang dikaji (KK.9.1) (PN)	3.000 Perda	9.000 Perda	3.000 Perda	2.500 Perda	2.500 Perda
				2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri (KK-9.2).	45 Prolegdagri	50 Prolegdagri	64 Rancangan Perundang-undangan	60 Rancangan Perundang-undangan	57 Rancangan Perundang-undangan
			4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri	1. Persentase Satker yg menyelenggarakan SIMAK BMN. (KK-19.2)	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN. (KK-19.3)	-	-	100%	100%	100%

NO. (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR (5)	TARGET KINERJA				
					2010 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)
				3. Persentase Sarker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan. (KK-19.4)	100%	100%	100%	100%	100%
				4. Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang mengikuti Diklat. (KK-19.5)	100%	100%	-	-	-
				5. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KK 19.5)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan.	1. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%
				2. Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah.	25% (4 Daerah)	50% (4 Daerah)	100% (4 Daerah)	100% (4 Daerah)	-
					-	15% (3 Daerah)	95 % (3 Daerah)	100% (3 Daerah)	-
			6. Meningkatkan hasil pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti. (PB)	45%	50%	55%	60%	65%

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan rencana pembangunan jangka menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 tahun 2010-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Adapun agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga Misi di atas adalah:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;
- Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan
- Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Sedangkan rumusan RPJMN Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada Visi, Misi, Agenda Pokok dan Prioritas Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dari kesebelas Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik.

Sejalan dengan penugasan dimaksud, ditetapkan arah capaian dalam bentuk tema prioritas dan substansi inti penugasan pada masing-masing Prioritas Nasional (PN), yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

PN-1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Tema Prioritas: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Substansi inti:

PN-1.1: Otonomi Daerah:

- a. Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

PN-1.2: Regulasi:

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi

pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011.

PN-1.3: Sinergi antara Pusat dan Daerah:

Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PN-1.4: Data Kependudukan:

Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

PN-2: Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Tema Prioritas: Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Substansi Inti:

PN-2.1: PNPM Mandiri:

Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010 (untuk seluruh Kementerian/Lembaga).

PN-3: Infrastruktur

Tema Prioritas: Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum diseluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Substansi inti:

PN-3.1: Tanah dan Tata Ruang:

Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.

PN-4: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Tema Prioritas: Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Substansi Inti:

PN 4.1: Kepastian Hukum:

Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

PN 4.2: Penyederhanaan Prosedur:

Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota, serta pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

PN-5: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Tema Prioritas: Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.

Substansi Inti:

PN 5.1: Kebijakan:

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan

secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Program 1: Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (P1)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang diukur dari:

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pemerintahan umum, yang diukur dari:

1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik;
3. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan;

4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
5. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara;
6. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG);
7. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan;
8. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota;
9. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi);
10. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan;
11. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar;
12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus; serta
13. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah,6 serta Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Program 3: Penataan Administrasi Kependudukan (P3)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk,

koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan, serta terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan, yang diukur dari:

1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan tersambung (*on-line*) dengan provinsi dan nasional;
2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal;
3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Pemutakhiran *database* kependudukan Kabupaten/Kota;
4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun *data center* kependudukan secara *on-line*;
5. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk;
6. Jumlah K/L yang dapat mengakses *database* kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik;
7. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan secara tersistem dan utuh;
8. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah;
9. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan Petugas registrasi;
10. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional;
11. Jumlah penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari;
12. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
13. Persentase Pemda (kabupaten/kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan; serta
14. Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
6. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta
7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Program 4: Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (P4)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru, penataan daerah otonom dalam kerangka Strategi Dasar Penataan Daerah, serta terwujudnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan tindak lanjut penyelesaian peraturan derivatifnya dan penyusunan UU tentang PEMILU KDH dan WKDH, penyelenggaraan Pilkada yang efisien, dan harmonisasi peraturan per-UU-an terkait dengan otonomi daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap, yang diukur dari:

1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh Kementerian/Lembaga;
2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah;
3. Jumlah provinsi, kabupaten/kota, Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi;
5. Persentase penyusunan SDPD/ *Grand Strategy*;
6. Jumlah dokumen revisi UU Nomor 32 Tahun 2004;
7. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2004, Kajian mengenai Gubernur, Kajian Terkait Posisi dan Pemilihan Wakil KDH, serta UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Persentase Inventarisasi peraturan perundangan-undangan sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU-an Otonomi daerah di pusat dan di daerah; serta
10. Persentase peraturan perundangan-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I;
3. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II;
4. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus, dan DPOD;
5. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta
6. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Program 5: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (P5)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, yang diukur dari:

1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;
2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;
4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;
5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se – Indonesia;
6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian/Lembaga;
7. Persentase daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK;

8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta
9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Keuangan Daerah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
2. Pembinaan Anggaran Daerah;
3. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
4. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; serta
5. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Program 6: Bina Pembangunan Daerah (P6)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diukur dari:

1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;
2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang

memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya;

4. Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
5. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.
6. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;
7. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE;
8. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;
9. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP;
10. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis;
11. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;
12. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;
13. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;
14. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;
15. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD;
16. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi;
17. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov;
18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi;
19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah;
20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang;
21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif;
22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;
23. Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota; serta
25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Bina Pembangunan Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu;
4. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah;
5. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; serta
6. Fasilitasi Penataan Perkotaan.

Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis, yang diukur dari:

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;
2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;
3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa;
4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;
6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
7. Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;

9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);
10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara;
11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu;
12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*jatropha curcas lin*); serta
13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

Program 8: Pendidikan Kepamongprajaan (P8)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan kepamongprajaan.

Indikator Kinerja Program adalah tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi, yang diukur dari:

1. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian”; dan
2. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan);

Pelaksana program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan;

2. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;
3. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; serta
4. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.

Program 9: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P9)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diukur dari:

1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi;
3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota tertentu;
4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta
5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal;
2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I;
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II;
4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III;
5. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta

6. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

Program 10: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;
4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014;
5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi
6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;
8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999;
9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah;
11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS;
12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;

14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD;
16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi;
17. Jumlah Perda yang dikaji;
18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan Prolegdagri;
19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK BMN;
20. Hibah dan PNPB melalui mekanisme APBN;
21. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; serta
22. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
3. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja;
4. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum;
5. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan;
6. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
7. Pengelolaan Penerangan;
8. Pengkajian Kebijakan Strategik;
9. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta
10. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

Program 11: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P11)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

Indikator Kinerja Program adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:

1. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri untuk kategori fasilitas tertentu; serta
2. Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah

Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program 12: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (P12)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, yang diukur dari persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

Pelaksana program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah;
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan;
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; serta
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program 13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P13)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang diukur dari:

1. Jumlah alumni diklat;
2. Persentase meningkatnya jumlah peserta sesuai dengan persyaratan diklat;
3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda yang disusun;
4. Jumlah naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi;

5. Jumlah modul kediklatan yang terstandar;
6. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan;
7. Jumlah tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi;
8. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat;
9. Jumlah lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya; serta
10. Jumlah lembaga Diklat yang efektif.

Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukan dan Keuangan Daerah;
4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis
5. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; serta
6. Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program terhadap prioritas nasional tahun 2010 - 2014 lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disajikan dalam Tabel 2: Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program terhadap Prioritas Nasional Tahun 2010 - 2014 Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2
 MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
 TERHADAP PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2010 - 2014
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM (P)													PRIORITAS NASIONAL (PN)				
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	PN1	PN2	PN3	PN4	PN5
T1	T1S1	●																	
	T1S2	●																	
	T1S3	●																	
	T1S4	●																	
T2	T2S1		●												■				
	T2S2		●												■				
	T2S3		●															■	
	T2S4		●																
	T2S5		●																
	T2S6		●																
	T2S7		●																
T3	T3S1			●											■				
	T3S2			●											■				
	T3S3			●											■				
	T3S4			●															
	T3S5			●															
	T3S6			●															
T4	T4S1				●										■				
	T4S2				●										■				
	T4S3				●										■				
	T4S4				●										■				
	T4S5				●										■				
	T4S6				●										■				
T5	T5S1					●									■				
	T5S2					●													
	T5S3					●													
T6	T6S1						●												
	T6S2						●												
	T6S3						●												
	T6S4						●												
	T6S5						●											■	
	T6S6						●											■	
	T6S7						●										■		
	T6S8						●										■		
T7	T7S1							●											
	T7S2							●											
	T7S3							●											
	T7S4							●									■		
	T7S5							●											
	T7S6							●											
T8	T8S1									●									
	T8S2													●					
	T8S3													●					
	T8S4								●										
T9	T9S1										●								
	T9S2										●								
	T9S3										●				■				
	T9S4										●								
	T9S5											●							
	T9S6												●						
PN	PN-1		■	■	■	■					■								
	PN-2							■											
	PN-3						■												
	PN-4						■												
	PN-5		■																

Sesuai Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia, serta pertimbangan strategik lainnya 5 (lima) tahun kedepan, rencana kerja program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada 19 Kontrak Kinerja (KK) yang lebih lanjut dijabarkan dalam 63 Indikator Kontrak Kinerja, sebagai berikut:

a. Pemantapan Otonomi daerah untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Daerah

KK-1: Penataan Daerah Otonom:

KK-1.1: Evaluasi daerah pemekaran;

KK-1.2: Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang menyangkut pengaturan pemekaran;

KK-1.3: Penyusunan *Grand Strategy* Penataan Daerah.

KK-2: Pemilu Kepala Daerah:

KK-2.1: Upaya efisiensi pelaksanaan Pilkada;

KK-2.2: Pengkajian kembali Pilkada Gubernur untuk dipilih melalui DPRD;

KK-2.3: Pengkajian posisi dan pemilihan Wakil Kepala Daerah;

KK-2.4: Revisi UU Nomor 32/2004 dengan memisahkan isu Pilkada menjadi undang-undang tersendiri.

KK-3: Dana Perimbangan Pusat dan Daerah:

KK-3.1: Evaluasi pemanfaatan APBD Kabupaten/Kota oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah;

KK-3.2: Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

KK-4: SDM Aparatur Pemerintah Daerah:

KK-4.1: Revisi terhadap UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian;

KK-4.2: Evaluasi manajemen kepegawaian Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan oleh Pemerintah untuk tingkat Provinsi;

KK-4.3: Evaluasi netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi aparatur Pemda.

KK-5: Peningkatan *Private Public Partnership*:

KK-5.1: Penyediaan pelayanan terpadu 1 pintu;

KK-5.2: Penerbitan UU tentang Kemitraan Antara Pemda dan Swasta.

b. Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional

KK-6: Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasinya untuk penerbitan KTP:

KK-6.1: Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal;

KK-6.2: Pemutakhiran database kependudukan Kabupaten/Kota;

KK-6.3: Penyempurnaan aplikasi dan pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara *online*;

KK-6.4: Pemantapan pengembangan SIAK dan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;

KK-6.5: Mendorong Pemda Kabupaten/Kota menerapkan SIAK dalam pelayanan Administrasi Kependudukan secara tersistem dan utuh;

KK-6.6: Pelaksanaan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah;

KK-6.7: Penyediaan SDM pengelola SIAK dan Petugas registrasi;

KK-6.8: Penerapan awal (Uji Petik) KTP berbasis NIK Nasional secara terbatas di 6 Kabupaten/Kota pada Tahun 2009;

KK-6.9: Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat.

KK-7: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak:

KK-7.1: Mendorong adanya mekanisme hubungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang;

KK-7.2: Menjadikan Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;

KK-7.3: Mendorong pemerintah (sektor tertentu) dan pemerintah daerah terkait pemahaman pertambahan nilai manfaat ruang sebagai hasil dari penataan ruang;

- KK-7.4: Penyusunan Rancangan Permendagri tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
- KK-7.5: Penyusunan Rancangan Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- KK-8: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS:
 - KK-8.1: Penyusunan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS secara nasional (koordinasi dengan Meneg PAN & Reformasi Birokrasi, dan BKN);
 - KK-8.2: Penyusunan RPP tentang perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
 - KK-8.3: Penyusunan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD;
 - KK-8.4: Penyusunan desain sistem Diklat yang berbasis kompetensi;
 - KK-8.5: Pemetaan lembaga Diklat;
 - KK-8.6: Pelatihan penyusunan standar kompetensi, diklat *assesor* kompetensi;
 - KK-8.7: Pemetaan kompetensi aparatur pada SKPD Provinsi;
 - KK-8.8: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda;
 - KK-8.9: Pengkajian efektifitas kelembagaan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Pemda.
- KK-9: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat-Daerah:
 - KK-9.1: Harmonisasi 12.000 Perda selama 2 tahun, yakni: menertibkan penyampaian Perda oleh Pemda kepada Mendagri dan mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait; dan mempercepat penyampaian hasil harmonisasi Perda berupa perbaikan atau pembatalannya oleh Mendagri;
 - KK-9.2: Penyelesaian 95 Program Legislasi (Proleg) lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- KK-10: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum:

- KK-10.1: Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum;
 - KK-10.2: Mendorong Pemerintah Daerah yang belum membentuk Perda RTRW untuk segera membentuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - KK-10.3: Identifikasi dan inventarisasi, serta analisa penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - KK-10.4: Penyusunan konsep kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum melalui sistem pelayanan satu atap sesuai pengelolaan tata ruang;
 - KK-10.5: Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang.
- KK-11: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah:
- KK-11.1: Inventarisasi peraturan perundangan sektor yang belum sejalan dengan Peraturan perundangan otonomi Daerah di Pusat dan Daerah;
 - KK-11.2: Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Daerah terkait upaya sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah.
- KK-12: Penerapan SPIPISE pada PTSP di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis:
- KK-12.1: Lanjutan dari kegiatan P100H terkait Penerapan SPIPISE disertai langkah-langkah khusus terkait dengan: penyusunan modul pelatihan peningkatan kapasitas aparat penyelenggara PTSP di daerah; dan penyusunan Indikator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja PTSP.
- KK-13: Pengentasan daerah tertinggal:
- KK-12.2: Meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana lokal di pedesaan dan peningkatan kapasitas Pemda, masyarakat dan dunia usaha;
 - KK-12.3: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan program PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Penataan Paket Undang-Undang Politik

KK-14: Revisi Paket Lima Undang-Undang Politik (UU Penyelenggaraan Pemilu; UU Pemilu Kepala Daerah; UU Partai Politik; UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Pemilu Presiden):

Menyusun draft Lima Paket Undang-Undang Politik dan mengkomunikasikannya dengan lembaga terkait, melalui inisiatif untuk penyelenggaraan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR untuk menyamakan persepsi mengenai:

- ✓ percepatan revisi UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 22/2007) paling lambat pertengahan tahun 2010 untuk mengakomodir “rencana” penggantian KPU menjadi tahun 2011, sehingga periodisasi KPU menjadi lebih panjang untuk persiapan Pemilu daripada masa untuk evaluasi Pemilu;
- ✓ penataan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (mempercepat penyusunan RUU Pemilu Kepala Daerah paling lambat pertengahan 2010, dan menunda Pilkada serentak sampai 2011); dan
- ✓ Penghentian sementara pemekaran daerah sampai selesainya evaluasi pelaksanaan pemekaran daerah yang telah dilakukan dan menunggu selesainya revisi UU Pemerintah Daerah.

Apabila langkah di atas sudah terlaksana, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Penggantian atau pemotongan periodisasi/masa jabatan KPU akan terlaksana melalui revisi UU Penyelenggara Pemilu;
- b. Penetaan Pemilu Kepala Daerah/penundaan Pilkada serentak dapat dilakukan melalui penerbitan Perppu; dan
- c. Penghentian sementara pemekaran daerah, apabila Pemerintah dan DPR secara prinsip sudah sepakat, maka pelaksanaannya cukup dengan Surat Mendagri kepada para Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD dengan alasan menunggu hasil evaluasi dan revisi UU Pemerintah Daerah.

KK-15: Masa Jabatan KPU dan Revisi UU Penyelenggaraan Pemilu:

Melakukan revisi terbatas atas UU Nomor 22 Tahun 2007.

d. Reformasi Bidang Pelayanan Umum

KK-16: Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum:

KK-16.1: Koordinasi dalam pengkajian dan penyusunan perbaikan regulasi/kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan pelayanan umum;

KK-16.2: Penyusunan kerangka pengaturan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah.

e. Perbaikan Peraturan yang Mendukung Investasi di Daerah

KK-17: Perbaikan Peraturan yang Mendukung Investasi di Daerah:

KK-17.1: Menyusun masukan revisi PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 dan menyempurnakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 sebagai turunannya.

f. Strategi pencapaian Sasaran-Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014

KK-18: Strategi pencapaian Sasaran-Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014:

KK-18.1: Menetapkan dan melaksanakan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014;

KK-18.2: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 2010-2014;

KK-18.3: Mengendalikan penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya;

KK-18.4: Menjaga konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014.

g. Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

KK-19: Perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri:

KK-19.1: *Review* Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;

KK-19.2: Penataan aset Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;

KK-19.3: Penertiban hibah dan PNBP Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme APBN;

KK-19.4: Pengendalian akuntabilitas belanja negara sesuai peraturan perundangan;

KK-19.5: Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset Kementerian Dalam Negeri sesuai standar akuntansi dan manajemen aset.

Keterkaitan antara sasaran dan program terhadap kontrak kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia disajikan dalam Tabel 3. Sedangkan keterkaitan kontrak kinerja Menteri, rencana aksi, sasaran, indikator sasaran, program dan komponen sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 3

**MATRIK KETERKAITAN ANTARA SASARAN DAN PROGRAM
TERHADAP KONTRAK KINERJA MENTERI DALAM NEGERI
KABINET INDONESIA BERSATU II DENGAN PRESIDEN RI**

SASARAN	PROGRAM	KONTRAK KINERJA (KK)
		Pemantapan Otonomi daerah untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Daerah
T4S3, T4S4	P4	KK-1: Penataan Daerah Otonom.
T4S5	P4	KK-2: Pemilu Kepala Daerah.
T5S1, T5S2	P5	KK-3: Dana Perimbangan Pusat dan Daerah.
T9S2	P10	KK-4: SDM Aparatur Pemerintah Daerah.
T6S6	P6	KK-5: Peningkatan <i>Private Public Partnership</i> .
		Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional
T3S1, T3S3, T3S6	P3	KK-6: Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dengan mengguna-kan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasinya untuk penerbitan KTP.
T6S7	P6	KK-7: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak.
T9S2, T8S3	P10, P13	KK-8: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.

SASARAN	PROGRAM	KONTRAK KINERJA (KK)
T9S3	P10	KK-9: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat-Daerah.
T6S8	P6	KK-10: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.
T4S6	P4	KK-11: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah.
T6S5	P6	KK-12: Penerapan SPIPISE pada PTSP di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis.
T7S3, T7S4	P7	KK-13: Pengentasan daerah tertinggal.
		Penataan Paket Undang-undang Politik
T1S1	P1	KK-14: Revisi Paket Lima Undang-Undang Politik (UU Penyelenggaraan Pemilu; UU Pemilu Kepala Daerah; UU Partai Politik; UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Pemilu Presiden).
T1S1	P1	KK-15: Masa Jabatan KPU dan Revisi UU Penyelenggaraan Pemilu.
		Reformasi Bidang Pelayanan Umum
T2S1, T6S9	P2, P6	KK-16: Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum.
		Perbaikan Peraturan yang Mendukung Investasi di Daerah
T5S3	P5	KK-17: Perbaikan Peraturan yang Mendukung Investasi di Daerah.
		Strategi pencapaian Sasaran-Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014
T9S1	P10	KK-18: Strategi pencapaian Sasaran-Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014.
		Perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
T8S1, T9S4	P9, P10	KK-19: Perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 4
MATRIK KETERKAITAN KONTRAK KINERJA MENTERI,
INDIKATOR KONTRAK KINERJA, SASARAN, INDIKATOR SASARAN,
PROGRAM DAN KOMPONEN

KONTRAK KINERJA	INDIKATOR KONTRAK KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KOMPONEN
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KK-1	KK 1.1	T4S3	T4S3-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK 1.2	T4S4	T4S4-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK-1.3	T4S3	T4S3-i2	P4	Ditjen OTDA
KK-2	KK-2.1	T4S5	T4S5-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK-2.2	T4S5	T4S5-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK-2.3	T4S5	T4S5-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK-2.4	T4S5	T4S5-i1	P4	Ditjen OTDA
KK-3	KK-3.1	T5S1	T5S1-i2	P5	Ditjen KEUDA
	KK-3.2	T5S2	T5S2-i1	P5	Ditjen KEUDA
KK-4	KK-4.1	T9S2	T9S2-i5	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-4.2	T9S2	T9S2-i8	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-4.3	T9S2	T9S2-i9	P10	Sekretariat Jenderal
KK-5	KK-5.1	T6S6	T6S6-i1	P6	Ditjen BANGDA
	KK-5.2	T6S6	T6S6-i3	P6	Ditjen BANGDA
KK-6	KK-6.1	T3S1	T3S1-i2	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.2	T3S1	T3S1-i3	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.3	T3S1	T3S1-i4	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.4	T3S3	T3S3-i6	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.5	T3S3	T3S3-i2	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.6	T3S3	T3S3-i3	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.7	T3S3	T3S3-i4	P3	Ditjen DUKCAPIL
	KK-6.8	T3S3	T3S3-i5	P3	Ditjen DUKCAPIL

KONTRAK KINERJA	INDIKATOR KONTRAK KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KOMPONEN
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KK-6.9	T3S6	T3S6-i1	P3	Ditjen DUKCAPIL
KK-7	KK-7.1	T6S7	T6S7-i1	P6	Ditjen BANGDA
	KK-7.2	T6S7	T6S7-i2	P6	Ditjen BANGDA
	KK-7.3	T6S7	T6S7-i3	P6	Ditjen BANGDA
	KK-7.4	T6S7	T6S7-i4	P6	Ditjen BANGDA
	KK-7.5	T6S7	T6S7-i5	P6	Ditjen BANGDA
KK-8	KK-8.1	T9S2	T9S2-i11	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-8.2	T9S2	T9S2-i12	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-8.3	T9S2	T9S2-i13	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-8.4	T8S3	T8S3-i4	P13	Badan DIKLAT
	KK-8.5	T8S3	T8S3-i9	P13	Badan DIKLAT
	KK-8.6	T8S3	T8S3-i7	P13	Badan DIKLAT
	KK-8.7	T8S3	T8S3-i8	P13	Badan DIKLAT
	KK-8.8	T8S3	T8S3-i3	P13	Badan DIKLAT
	KK-8.9	T8S3	T8S3-i10	P13	Badan DIKLAT
KK-9	KK-9.1	T9S3	T9S3-i1	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-9.2	T9S3	T9S3-i2	P10	Sekretariat Jenderal
KK-10	KK-10.1	T6S8	T6S8-i1	P6	Ditjen BANGDA
	KK-10.2	T6S8	T6S8-i2	P6	Ditjen BANGDA
	KK-10.3	T6S8	T6S8-i3	P6	Ditjen BANGDA
	KK-10.4	T6S8	T6S8-i4	P6	Ditjen BANGDA
	KK-10.5	T6S8	T6S8-i5	P6	Ditjen BANGDA
KK-11	KK-11.1	T4S6	T4S6-i1	P4	Ditjen OTDA
	KK-11.2	T4S6	T4S6-i2	P4	Ditjen OTDA
KK-12	KK-12	T6S5	T6S5-i1, i2, i3, i4, i5	P6	Ditjen BANGDA
KK-13	KK-13.1	T7S3	T7S3-i1, i2	P7	Ditjen PMD

KONTRAK KINERJA	INDIKATOR KONTRAK KINERJA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KOMPONEN
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KK-13.2	T7S4	T7S4-i1, i2	P7	Ditjen PMD
KK-14	KK-14	T1S1	T1S1-i1	P1	Ditjen KESBANGPOL
KK-15	KK-15	T1S1	T1S1-i1	P1	Ditjen KESBANGPOL
KK-16	KK-16.1	T2S1	T2S1-i1	P2	Ditjen PUM
	KK-16.2	T6S9	T6S9-i1	P6	Ditjen BANGDA
KK-17	KK-17	T5S3	T5S3-i1	P5	Ditjen KEUDA
KK-18	KK-18.1	T9S1	T9S1-i1	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-18.2	T9S1	T9S1-i2	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-18.3	T9S1	T9S1-i3	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-18.4	T9S1	T9S1-i4	P10	Sekretariat Jenderal
KK-19	KK-19.1	T8S1	T8S1-i14	P9	Inspektorat Jenderal
	KK-19.2	T9S4	T9S4-i1	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-19.3	T9S4	T9S4-i2	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-19.4	T9S4	T9S4-i3	P10	Sekretariat Jenderal
	KK-19.5	T9S4	T9S4-i4, i5	P10	Sekretariat Jenderal

Keterangan :

- Kolom 1 : KK = Kontrak Kinerja (keterangan kode lihat pada Bab III Butir 3.2);
- Kolom 2 : Indikator Kontrak Kinerja adalah Rencana Aksi sebagai turunan dari masing-masing Kontrak Kinerja;
- Kolom 3 : Sasaran yang harus dicapai dari masing-masing Rencana Aksi (T=Tujuan dan S=Sasaran, keterangan kode lihat pada Bab II Butir 2.4)
- Kolom 4 : Indikator Sasaran adalah alat ukur untuk menunjukkan cara pencapaian sasaran (i=Indikator, keterangan kode lihat pada Tabel 1 kolom 5)
- Kolom 5 : Program adalah 13 Program Strategik Kementerian Dalam Negeri (keterangan kode lihat pada Bab III Butir 3.2)

Kolom 6 : Komponen adalah Eselon I pelaksana Kontrak Kinerja

Secara keseluruhan, 13 program strategis Kementerian Dalam Negeri, termasuk 19 Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia, dijabarkan dalam Target dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 pada Lampiran II.

IV. PENUTUP

Renstra Kemendagri 2010-2014 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Seluruh komponen diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 kedalam Rencana Strategis Unit Organisasinya masing-masing.
3. Rencana Strategis pada lingkup Unit Organisasi masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I bersangkutan.
4. Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri (RKA-Kemendagri) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
5. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
7. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat kementerian dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
8. Fungsi Pengawasan di tingkat Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
9. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam

bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri. Pada akhir periode (tahun 2014) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

10. Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
11. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5

ORGANISASI PENYELENGGARA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Menteri Dalam Negeri	Penanggungjawab Umum
2.	2.1. Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab Program
	2.2. Inspektur Jenderal	
	2.3. Para Direktur Jenderal	
	2.4. Para Kepala Badan	
	2.5. Rektor IPDN	
3.	Para Sekretaris Komponen, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Penanggungjawab Kegiatan

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : *AC Thm 2011*
 TANGGAL : *28 Sept 2011*

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2010-2014

I. TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2010 - 2014

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1) PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(2) Meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	(3) 1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi terbatas terhadap UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK-15)	(4) 1 Dokumen RUU Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15)	(5) 1 Dokumen RUU Revisi terbatas UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (KK 15)	(6) -	(7) -	(8) -	(9) DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik (KK 14)	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Partai Politik	-	-	-	
			1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14)	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14) PB	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (KK 14) PB	-	-	
			1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) PB	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) PB	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU Pilpres (KK 14) PB	-	-	
			1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) PB	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) PB	1 Dokumen RUU revisi terbatas UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (KK 14) PB	-	-	
		2 Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi (PB)	52,3	66	68	-	70	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
(1)	(2)	(3)	-	-	-	3	-	(9)
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Kesbangpol	3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil (PB)	-	-	-	-	-	
		4. Indeks Kebebasan Sipil (PB)	75,7	78	79	-	80	
		5. Indeks Hak-Hak Politik (PB)	53	66	68	-	70	
		6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan (PB)	-	70 %	75 %	80 %	80 %	
		7. Persentase forum dialog publik yang efektif (PB)	-	70 %	75 %	80 %	80 %	
		1. Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SEKRETARIAT DITJEN KESBANGPOL
		2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (Renstra,RKP,RENJA, RKA-KL dan Juklak-Juknis)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		3. Persentase pengukuran kesesuaian Capaian Kinerja	75 %	78 %	80 %	82,5 %	85 %	
		4. Jumlah Koordinasi aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota	2 Kegiatan meliputi 531 prov/kab/kota	
		5. Persentase pedoman/ juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan	50 %	65 %	75 %	80 %	85 %	
6. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan - aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %			

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		7. Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Kesbangpol	6 jenis dokumen 12 bulan	6 jenis dokumen 12 bulan	6 jenis dokumen 12 bulan	6 jenis dokumen 12 bulan	6 jenis dokumen 12 bulan	DIREKTORAT BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
		8. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawalan	75%	80%	85%	90 %	90%	
		9. Jumlah Pengadaan sarana &/ Prasarana non mengikat	46 kegiatan pengadaan	46 kegiatan pengadaan	50 kegiatan pengadaan	50 kegiatan pengadaan	50 kegiatan pengadaan	
		1. Persentase jumlah penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu (PB)	-	75%	80%	85%	87%	
		2. Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan (PN)	-	1 Modul Wawasan Kebangsaan	1 Modul Wawasan Kebangsaan	1 Modul Wawasan Kebangsaan	1 Modul Bingkai Kebangsaan	
			-	1 Modul Pembauran Kebangsaan	1 Modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa	1 Modul Ketahanan Bangsa	-	
			-	1 Modul Bela Negara	1 Modul Bela Negara	1 Modul Bela Negara	-	
			-	1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Pranata Sosial				
		3. Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah (PN)	-	15	20	25	25	
		4. Jumlah peserta TOT/ peningkatan kapasitas kader pembauran (PB)	-	7 provinsi (tiap provinsi 7 orang)	7 provinsi (tiap provinsi 7 orang)	7 provinsi (tiap provinsi 7 orang)	7 provinsi (tiap provinsi 7 orang)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional		5. Persentase Peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat (PB)	70%	75%	77,5%	85%	87%	DIREKTORAT FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL
		6. Jumlah kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (PB)	-	134 paket kerjasama di 33 provinsi	134 paket kerjasama di 33 provinsi	134 paket kerjasama di 33 provinsi	134 paket kerjasama di 33 provinsi	
		7. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan Kebangsaan (PB)	-	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	
		1. Persentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik sosial (PB)	-	50%	85%	90%	100%	
	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional	2. Persentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik (PB)	40%	60%	65%	70%	75%	
		3. Jumlah angkatan aparaturnya pmda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)	8	10	10	10	10	
		4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi dan Monev dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan (PB)	6 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat)	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)	7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT)	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran ketahanan seni, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan	5. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik (PB)	-	16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 100 paket kerjasama di 33 provinsi	16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 100 paket kerjasama di 33 provinsi	16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 100 paket kerjasama di 33 provinsi	16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik 100 paket kerjasama di 33 provinsi	DIREKTORAT FASILITASI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
		6. Persentase Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional (PB)	-	75%	77.50%	80%	82.50%	
		7. Persentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing (PB)	-	70%	75%	80%	85%	
		8. Jumlah laporan pemantauan situasi daerah (PB)	1 laporan puskommin	1 laporan puskommin	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		1. Jumlah dokumen indeks masyarakat sipil	-	-	-	1 Dokumen	-	
		2. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas (PB)	580 Ormas, LSM dan LNL	500 Ormas, LSM dan LNL	500 Ormas, LSM dan LNL	500 Ormas, LSM dan LNL	500 Ormas, LSM dan LNL	
		3. Persentase kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas (PB)	55%	80%	100%	-	-	
		4. Persentase kemajuan penyusunan desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelengg. kebijakan publik bid. ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan (PB)	-	75%	85%	90%	100%	
		5. Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan (PB)	-	50%	55%	60%	65%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		6. Tingkat pelayanan publik termasuk data basenya (PB)	50%	60%	65%	70%	75%	
		7. Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah	-	95%	97,5%	100%		
		8. Jumlah modul pengembangan nilai Budaya kebangsaan (PN)	-	-	1 Modul Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	-	-	
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi Politik Dalam Negeri	1. Persentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu (PB)	50%	75%	85%	87,5%	90%	DIREKTORAT FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI
		2. Persentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan (PB)	50%	75%	85%	87,5%	90%	
		3. Jumlah fasilitasi forum komunikasi politik (PB)	-	3	3	3	3	
		4. Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu (PB)	75%	80%	85%	90%	95%	
		5. Persentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (PB)	50%	100%	100%	-	-	
		6. Persentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (PB)	50%	100%	100%	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi		7. Persentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PB)	50%	100%	100%	-	-	DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI
		8. Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan (PB)	-	100	100	100	100	
		9. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (PB)	-	9 parpol	9 parpol	9 parpol	9 parpol	
		10. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri	-	-	234	284	334	
		11. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula (PB)	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula	1 Modul	1 Modul	1 Modul	
		12. Jumlah Publikasi best practice dan inovasi praktek demokrasi	-	50	50	50	50	
		1. Persentase penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi (PB)	-	75%	50%	75%	85%	
		2. Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi	-	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor	50 paket Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi dgn lintas sektor	
		3. Jumlah Fasilitasi Forum Bidang Pembinaan Ketahanan Ekonomi (PB)	-	7 forum	9 forum	12 forum	14 forum	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		4. Jumlah materi/ modul Ketahanan Ekonomi (PB)	-	4 materi /modul	4 materi /modul	4 materi /modul	4 materi /modul	
		5. Jumlah Pembangunan Manajemen Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi (PB)	-	Perancangan Manajemen Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi	Perancangan Manajemen Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi	Perancangan Manajemen Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi	Perancangan Manajemen Information System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi	
		6. Laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (PB)	-	6 Laporan bulanan	10 Laporan bulanan	12 Laporan bulanan	12 laporan bulanan	
		7. Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang (PB)	-	1	1	-	-	
		8. Persentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund (PB)	-	25%	50%	75%	85%	
		9. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan (PB)	-	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum	1 laporan masukan hasil pertemuan/ forum	-	

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemerintahan umum	1. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perlinan di daerah	-	5 Daerah (2 Produk Pengaturan)	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
		2. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. (KK 16 1) (PB)	10 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi (1 Permendagri)	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	
		3. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah	-	9 Provinsi	9 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	
		4. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen	
		5. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia	50%	80%	90%	100%	-	
		6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	20%	30%	60%	80%	100%	
		7. Jumlah Pos Lintas Batas tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelola serta fasilitas pendukung yang memadai	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
		8. Fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK	75%	75%	75%	75%	75%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		9. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan	3 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	
		10. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota	-	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	
		11. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)	15%	35%	55%	75%	100%	
		12. Pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia	-	50%	60%	75%	90%	
		13. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan	-	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	3 Provinsi	
		14. Jumlah aparat Satpol PP dan Satlinmas yang mendapatkan pembinaan penegakan Perda dan perlindungan masyarakat	-	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	
		15. Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi penetapan kawasan khusus dan pengembangannya	-	5 Daerah	5 Daerah	6 Daerah	6 Daerah	
		16. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus	-	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	
		17. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus	-	7 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	
		18. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanian	-	50%	60%	65%	70%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013		2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DITJEN PUM
		2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Persentase pedoman/ juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	80%	80%	80%	80%	80%	
		6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	-	80%	82%	84%	86%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah	1. Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan	1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (KK 16.1) (PB)	1 Permendagri 10 Kabupaten/Kota di 6 provinsi	Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	Kabupaten/Kota di 6 Provinsi	DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA
		2. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perjanjian di daerah	-	5 Daerah (2 Produk Pengaturan)	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	
		3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum	4	4	4	4	4	
		4. Persentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum	-	-	90%	95%	100%	
		5. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
		6. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)	10%	15%	15%	20%	20%	
		8. Jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)	10	10	10	12	14	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		9. Jumlah kumulatif daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah	-	9 Provinsi	17 Provinsi	25 Provinsi	33 Provinsi	
		10. Jumlah pemetaan pelaksanaan Daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)	-	-	1 paket laporan	-	-	
		11. Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)	-	-	-	1 paket (updating)	1 paket (updating)	
		12. Jumlah kegiatan fasilitas kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)	10	10	10	12	14	
		13. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi (PB)	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	
		14. Jumlah laporan fasilitasi kesekretariatan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah(PB)	-	-	1	1	1	
		15. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam meningkatkan kerjasama daerah di bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik	5 Provinsi	9 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi	6 Provinsi	
3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, pengembangan/ pengelolaan/ pervediaan	1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi (PB)	4	4	4	4	4	DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	
	sarpras perbatasan antar negara	2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penguasaan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi	-	-	85%	90%	95%
		3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penguasaan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		4. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Jumlah segmen penataan dan penguasaan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (PB)	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen	15 segmen
		6. Persentase penurunan konflik karena sengketa perbatasan antar daerah	-	-	10%	10%	10%
		7. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)	15%	35%	55%	75%	100%
		8. Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai (PN)	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
		9. Persentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara (PN)	25%	50%	75%	85%	100%

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		10. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara (PN)	8	10	15	17	20	
		11. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKIMALINDO, JBC RI-ROTL, JBC RI-PNG (PN)	6 provinsi	7 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	6 provinsi	
		12. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan	3 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	
		13. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota	-	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	
		14. Persentase pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia	-	50%	60%	70%	90%	
		15. Jumlah sarana prasarana Pos Lintas Batas dan fasilitas pemerintah di perbatasan antar negara	5 Unit Gedung di 5 Pos Lintas Batas dan 1 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan	4 Unit Gedung di 4 Pos Lintas Batas dan 4 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan	-	-	-	
		16. Persentase daerah di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara	25%	50%	75%	85%	100%	
		17. Jumlah segmen yang terselenggara dalam percepatan penyelesaian batas daerah	-	100 Segmen	150 Segmen	200 Segmen	250 Segmen	
		18. Jumlah Permendagri tentang penegasan batas daerah	20 permendagri	20 permendagri	15 permendagri	15 permendagri	15 permendagri	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
4. Pembinaan Ketenteraman, Kertertiban dan Perlindungan Masyarakat	Terasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketenteraman, Kertertiban dan Perlindungan Masyarakat	19. Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	DIREKTORAT KETENTERAMAN, KERTERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		20. Persentase penyusunan gasetir (pulaupulau) seluruh Indonesia	50%	80%	90%	100%	-	
		21. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, serta penyediaan sarpras pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
		22. Jumlah pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara (RI- Malaysia, RI- RDTL, RI- PNG)	7 Pertemuan	7 Pertemuan	5 Pertemuan	5 Pertemuan	5 Pertemuan	
		1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia	-	2	3	3	3	
		2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Masyarakat, serta bidang Hak Asasi Manusia	-	-	90%	95%	100%	
		3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta penegakan Hak Asasi Manusia	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		4. Jumlah daerah yang mendapat sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-	-	5 daerah	5 daerah	5 daerah	
		5. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	20%	30%	60%	80%	100%	
		7. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar (PN)	20%	40%	60%	80%	100%	
		8. Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal	-	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	100% TKIB deportasi terlayani	
		9. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan	-	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	3 Provinsi	
		10. Jumlah provinsi yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan	-	11 Provinsi	11 Provinsi	11 Provinsi	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		11. Persentase daerah yang telah memfasilitasi SP (penghormatan, kemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/embarkasi serta fasilitas konferensi internasional bagi aparat Satpol PP	-	50%	60%	70%	80%	DIREKTORAT KAWASAN DAN OTORITA
		12. Persentase daerah yang telah melaksanakan Sistem dan Prosedur operasional penyelenggaraan ketertarikan masyarakat dan ketertiban umum	-	50%	50%	60%	70%	
		13. Persentase daerah yang mempunyai aparat Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar	-	20%	60%	80%	70%	
		1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus, dan pertanahan serta perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan	2	3	5	5	5	
		2. Jumlah daerah yang difasilitasi dibidang kawasan Ekonomi, industri dan perdagangan bebas serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan	-	5 Daerah	14 Daerah	14 Daerah	14 Daerah	
		3. Persentase fasilitasi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, serta kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan (PB)	65%	70%	80%	85%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Penataan Kelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, serta Penyediaan Sarpras	4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus dan pertahanan, serta Kawasan perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	DIREKTORAT MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
		5. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Kawasan dan Pertahanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus	-	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	
		7. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus	-	7 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	8 Daerah	
		8. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertahanan	-	50%	60%	65%	70%	
		1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana	2	3	4	4	4	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
	Pemerintahan Pasca Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana	2. Persentase fasilitas pusat dan daerah bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana	70%	80%	90%	95%	100%
		3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
		4. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana	-	14	14	18	20
		5. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	-	10	10	12	14
		6. Persentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK	20%	40%	60%	80%	100%
		7. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Persentase fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (PB)	75%	75%	75%	75%	75%

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah (PB)	40%	50%	60%	70%	75%	
		10. Jumlah fasilitas di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana	-	9 Bidang	9 Bidang	9 Bidang	9 Bidang	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
(1) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	(2) Tertib data base kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, konektivitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya Perencanaan dan Keterserapan kebijakan kependudukan.	(3)						
		1. Jumlah kabupaten/kota yang data base kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
		2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal (KK 6.1)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	Stabilisasi sistem di 497 kabupaten/kota	Stabilisasi sistem di 497 kabupaten/kota	
		3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran data-base kependudukan (KK 6.2)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	Stabilisasi sistem 497 Kabupaten/kota	Stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara online (KK 6.3)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	
		5. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk (PN)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	
		6. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik (PB)	4 K/L	4 K/L	9 K/L	15 K/L	15 K/L	
		7. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari (KK 6.4) (PN)	-	67,95 juta-penduduk di 197 kabupaten/kota	105 juta penduduk di 300 kabupaten/kota	-	-	
		8. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Administrasi secara terintegrasi dan utuh (KK 6.5)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah (KK 6.6)	-	197 kabupaten/kota	300 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	SEKRETARIAT DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		10. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan petugas registrasi (KK 6.7)	-	9.392 petugas	15.544 petugas	-	-	
		11. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional (KK 6.8)	-	197 kabupaten/kota	-	-	-	
		12. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amatan UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (PB)	127 kabupaten/kota	250 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	
		13. Persentase Pemda (kabupaten/kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan	-	-	15%	35%	65%	
		14. Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat (KK 6.9)	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	
		1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		2. Jumlah dokumen pedoman/ juknis, rancangan peraturan perundangan dan surat keputusan lingkup Ditjen Dukcapil	10 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	
		3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan laporan keuangan dan aset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	6 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	
		4. Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukcapil	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk		5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		6. Persentase pengadaaan sarpras	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		7. Jumlah pemda provinsi yang melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang Dukcapil	32 provinsi	32 provinsi	32 provinsi	32 provinsi	32 provinsi	
		8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		9. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (PB)	127 Kab/Kota	250 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	497 Kab/Kota	
		10. Jumlah kumulatif peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PB)	4 Permendagri	7 Permendagri	11 Permendagri	15 Permendagri	18 Permendagri	
		11. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		1. Penyusunan pedoman pelaksanaan pendaftaran penduduk	1 Rancangan Permendagri	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK
		2. Cakupan pembinaan (koordinasi, Bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk	16 provinsi	16 provinsi	18 provinsi	21 provinsi	21 provinsi	
		3. Jumlah laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.	4 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	4 jenis laporan	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitas pelaksanaan pencatatan sipil	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %
		1. Jumlah pedoman pelaksanaan pencatatan sipil	4 Juknis/Rancangan Permendagri	3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	1 peraturan
		2. Cakupan pembinaan (koordinasi, BinteK, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	18 provinsi	18 provinsi	18 provinsi	19 provinsi	20 provinsi
		3. Jumlah laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil	4 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan
4. Pengelolaan Informasi Kependudukan	1. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitas pelaksanaan & pengelolaan informasi kependudukan	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %
		1. Jumlah pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan		2 Juknis/Rancangan Permendagri	2 Juknis/Rancangan Permendagri	2 Juknis/Rancangan Permendagri	2 Juknis/Rancangan Permendagri
		2. Cakupan operasional SIAK dan data-base kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional di kabupaten/ kota, provinsi dan nasional secara online	2 Data center & 329 kabupaten/kota	2 Data center & 168 kabupaten/kota	2 Data center & 497 kabupaten/kota	2 Data center & 497 kabupaten/kota	2 Data center & 497 kabupaten/kota
		3. Cakupan pembinaan (koordinasi, advokasi, BinteK, dampingan teknis dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan informasi kependudukan	28 kabupaten/kota	97 kabupaten/kota	186 kabupaten/kota	186 kabupaten/kota	27 kabupaten/kota
		4. Cakupan pelayanan informasi kependudukan melalui media cetak, media elektronik dan loket-loket pelayanan	3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media	3 jenis media

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI/IAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu	5. Jumlah program, laporan monitoring program, dan pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan informasi administrasi kependudukan	1 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		6. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Informasi Kependudukan	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	
		7. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik (PB)	4 K/L	4 K/L	9 K/L	15 K/L	15 K/L	
		1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	
		2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang utk mewujudkan NIK tunggal (KK.6.1)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem di 497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	
		3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran data base kependudukan (KK.6.2)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	
		4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SI/IAK di daerah maupun data center kependudukan secara online (KK.6.3)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		5. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari (KK.6.4) (PN)	-	67,015 juta penduduk di 197 kabupaten/kota	105,00 juta penduduk di 300 kabupaten/kota	-	-	-
		6. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. (PN)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	-
		7. Jumlah kabupaten/kota untuk menerapkan SIAK dalam pelayanan Administrasi secara terintegrasi dan utuh (KK.6.5)	329 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	-
		8. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biometrik, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah (KK.6.6)	-	197 kabupaten/kota	300 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	stabilisasi sistem 497 kabupaten/kota	-
		9. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan petugas registrasi (KK.6.7)	-	9.392 petugas	15.544 petugas	-	-	-
		10. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional (KK.6.8)	-	197 kab/kota	-	-	-	-
		11. Jumlah daerah sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat (KK.6.9)	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	-
		12. Jumlah daerah yang memperoleh dukungan operasional daerah dalam pelaksanaan penerbitan e-KTP	-	197 kabupaten/kota	300 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	497 kabupaten/kota	-

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
6. Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kebijakan kependudukan	1. Pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan	3 RPP & 2 Rancangan Permendagri	4 RPP	4 PP	2 rancangan Permendagri/Juknis	2 Permendagri/Juknis	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
		2. Jumlah kab/kota yang dikaji dan dirumuskan kebijakan perkembangan Kependudukan, serta profil kependudukan	6 kabupaten/kota	6 kabupaten/kota	18 kabupaten/kota	18 kabupaten/kota	6 kabupaten/kota	
		3. Cakupan pembinaan (koordinasi, BinteK, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan perkembangan kependudukan	14 provinsi	8 provinsi	30 provinsi	32 provinsi	32 provinsi	
		4. Jumlah laporan monitoring, evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan perkembangan kependudukan	-	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	
		5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	
7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan,	1. Pedoman pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan	1 RPP dan 1 Rancangan Permendagri	1 R Perpres 1 Rancangan Permendagri	3 Rancangan Permendagri	2 Rancangan Permendagri	4 Juknis	DIREKTORAT PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN
		2. Jumlah kab/kota yang dikaji dan dirumuskan perencanaan kependudukan, Indikator Kependudukan, Proyeksi Penduduk, Analisis Dampak Kependudukan, Tipologi Kependudukan Daerah dan penyerasian kebijakan kependudukan	7 kabupaten/kota	21 kabupaten/kota	21 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	
		3. Cakupan pembinaan (koordinasi, BinteK, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan proyekti dan penyerasian kebijakan kependudukan	33 paket 1050 org	16 provinsi	20 provinsi	24 provinsi	25 provinsi	
		4. Jumlah laporan pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan proyekti dan penyerasian kebijakan kependudukan	-	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	
		6. Persentase Pemda (kabupaten/kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan	-	-	15%	35%	65%	

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi perkembangan Daerah Otonom Baru, penataan daerah otonom dalam kerangka Strategi Dasar Penataan Daerah, serta terwujudnya kebijakan desentralisasi dan otda melalui Revisi UU 32/2004, tindak lanjut penyelesaian peraturan peraturannya, UU tentang PEMILU KDH dan WKDH, penyelenggaraan Pilkada yang efisien dan harmonisasi peraturan per-UU-an terkait dengan otonomi daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.	1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh KL (PB)	5 Bidang urusan	18 bidang urusan	22 bidang urusan	26 bidang urusan	31 bidang urusan	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
		2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah (PN)	5 SPM	10 SPM	15 SPM	15 SPM Sektor termonitor dalam penerapannya	15 SPM Sektor terevaluasi dalam penerapan	
		3. Jumlah provinsi/kab/kota Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	26 Provinsi usia diatas 10 tahun 293 Kab/Kota usia diatas 10 tahun 5 Provinsi Otsus 74 Kab/kota Otsus	28 Provinsi usia diatas 10 tahun 393 Kab/Kota usia diatas 10 tahun 5 Provinsi Otsus 74 Kab/kota Otsus	30 Provinsi usia diatas 10 tahun 443 Kab/Kota usia diatas 10 tahun 5 Provinsi Otsus 74 Kab/kota Otsus	32 Provinsi usia diatas 10 tahun 541 Kab/Kota usia diatas 10 tahun 5 Provinsi Otsus 74 Kab/kota Otsus	33 Provinsi usia diatas 10 tahun 568 Kab/Kota usia diatas 10 tahun 5 Provinsi Otsus 74 Kab/kota Otsus	
		4. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi (KK 1.1) (PN)	148 DOB diatas 3 s/d 10 tahun 100%	128 DOB diatas 3 s/d 10 tahun 100%	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun 100%	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun 100%	155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun 100%	
		5. Persentase penyusunan SDPD/Grand Strategy (KK 1.3) (PN)	100%	-	-	-	-	
		6. Jumlah Dokumen revisi UU 32 2004 (KK 1.2) (PN)	-	1 UU	-	-	-	
		7. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah (PB)	-	-	40%	60%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.	8. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : a. Revisi terbatas UU No.32 Tahun 2004 (KK 2.1)(PN) b. Kajian mengenai Gub (KK 2.2) c. Kajian terkait posisi dan pemilihan Wakil KDH (KK 2.3) d. UU tentang Pemilu KDH dan Wakil KDH (KK 2.4) (PN)	1 UU (Revisi terbatas UU No 32 Tahun 2004) 1 Dokumen 1 Dokumen	1 UU (Pemilu KDH dan WKDH)				
		9. Persentase inventarisasi peraturan per-uu-an sektor yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah. (KK 11.1) (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Persentase Peraturan per UU-an yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 11.2) (PB)	20%	30%	40%	50%	60%	
		1. Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran 2. Persentase Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah	1 Renja 1 Penetapan Kinerja 1 Renstra 1 RKA-KL	1 Renja 1 Penetapan Kinerja 1 RKA-KL	1 Renja 1 laporan RKA-KL	- Renja 1 laporan RKA-KL	1 Renja 1 laporan RKA-KL 1 draf Renstra	SEKRETARIAT DITJEN OTONOMI DAERAH
			4 laporan keuangan dan kegiatan 1 lap kinerja 1 LHP	4 laporan keuangan dan kegiatan 1 lap kinerja 1 LHP	4 laporan keuangan dan kegiatan 1 lap kinerja 1 LHP	4 laporan keuangan dan kegiatan 1 lap kinerja 1 LHP	4 laporan keuangan dan kegiatan 1 lap kinerja 1 LHP	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		3. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian tepat waktu.	100%tertib administrasi	100% tertib administrasi	100% tertib administrasi	100% tertib administrasi	100% tertib administrasi	
		5. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Dijen Otonomi Daerah	- 147 unit pengadaan meubelair - 116 unit pengadaan alat pengolah data - 175 unit pengadaan peralatan penunjang operasional	- 190 unit pengadaan meubelair - 120 unit pengadaan alat pengolah data - 190 unit pengadaan peralatan penunjang operasional	- 200 unit pengadaan meubelair - 130 unit pengadaan alat pengolah data - 190 unit pengadaan peralatan penunjang operasional	- 210 unit pengadaan meubelair - 135 unit pengadaan alat pengolah data - 100 unit pengadaan peralatan penunjang operasional	- 210 unit pengadaan meubelair - 135 unit pengadaan alat pengolah data - 100 unit pengadaan peralatan penunjang operasional	
		6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan rencana kinerja tahunan	75%	77%	80%	90%	100%	
		8. Jumlah Dokumen revisi UU 32 Tahun 2004 (KK 1.2) (PB)	-	1 UU	-	-	-	
		9. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah (PB)	-	-	40%	60%	100%	
		10. Jumlah sosialisasi peraturan bidang Otonomi Daerah (PB)	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta Standar Pelayanan minimal lingkup I.	11. Jumlah Pemerintah Pembagian Pemerintahan, Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. (PB)	-	-	1 Peraturan Pemerintah	-	-	DIREKTORAT URUSAN PEMERIN- TAHAN DAERAH I
		12. Jumlah Sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah. (PB)	-	-	-	1 Paket	-	
		1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi (PB)	3 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I	9 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I	11 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I	13 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I	16 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup I	
		2. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi & sosialisasi) pelaksanaan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD/ILGR)	9 provinsi dan 14 kab/kota terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2TPD/ILGR	9 provinsi dan 14 kab/kota Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2TPD/ILGR	-	-	-	
		4. Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		5. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	
		6. Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	
		7. Persentase perUU an sektor yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah (KK 11.1) (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Peraturan per UUan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 11.2) (PB)	20%	30%	40%	50%	60%	
		9. Jumlah SPM yang ditetapkan lingkup UPD I	7	8	-	-	-	
		10. Jumlah SPM yang diterapkan di daerah lingkup UPD I (PN)	3	5	8 SPM	8 SPM	8 SPM	
		11. Jumlah bidang SPM yang dimonitoring penerapannya pada lingkup UPD I (PN)	-	-	-	8 SPM	-	
		12. Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya pada lingkup UPD I (PN)	-	-	-	-	8 SPM	
		13. Jumlah Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. (PB)	-	-	-	1 Kebijakan	-	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
3. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta Standar Pelayanan minimal lingkup II	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi (PB)	2 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II	9 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II	11 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II	13 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II	15 jumlah bidang urusan yang disusun NSPK lingkup II	DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II
		2. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah	terfasilitasinya penyusunan dan perda tentang urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah	
		3. Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	
		4. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	
		5. Persentase Perda Kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dianalisis (PB)	30%	70%	80%	90%	100%	
		6. Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat lingkup UPD II (KK 11.1) (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus dan DPOD	Terselenggaranya pembinaan dan tersusunnya laporan pelaksanaan penataan Daerah Otonom Baru, Otonomi Khusus dan DPOD	7. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah (KK 11.2) (PB)	20%	30%	40%	50%	60%	
		8. Jumlah SPM yang ditetapkan lingkup UPD II	6	7	-	-	-	
		9. Jumlah SPM yang diterapkan di daerah lingkup UPD II (PN)	2	5	7 SPM	7 SPM	7 SPM	
		10. Jumlah bidang SPM yang dimonitoring penerapannya pada lingkup UPD I. (PN)	-	-	-	7 SPM	-	
		11. Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya pada lingkup UPD II. (PN)	-	-	-	-	7 SPM	
		1. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi (KK 1.1) (PN)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, DAN OTONOMI KHUSUS DAN DPOD
		2. Jumlah undang-undang tentang Daerah Khusus/Istimewa	-	1 UU	-	-	-	
		3. Jumlah peraturan pelaksanaan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus	3 RPP dan 2 Perpres	-	6 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom	5 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom	5 PP dan pedoman kebijakan daerah otonom	
		4. Cakupan pembinaan dan fasilitasi koordinasi, bintek, (advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan penataan daerah otonom	205 DOB terbina dalam peningkatan-peningkatan penyelenggaraan urusan pmda	205 DOB terbina dalam peningkatan-peningkatan penyelenggaraan urusan pmda	205 DOB terbina dalam peningkatan-peningkatan penyelenggaraan urusan pmda	205 DOB terbina dalam peningkatan-peningkatan penyelenggaraan urusan pmda	205 DOB terbina dalam peningkatan-peningkatan penyelenggaraan urusan pmda	
			33 prov. terbina dalam penataan daerah (pembentukan daerah)	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pembentukan daerah)	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pembentukan daerah)	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pembentukan daerah)	33 prov. terbina dalam penataan daerah (pembentukan daerah)	
			33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	
			33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	33 prov. tersosialisasi kebijakan penataan daerah	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
5. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa			4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa	4 Provinsi terbina dan terfasilitasinya implementasi kebijakan otonom khusus dan istimewa	(9)
			1 Provinsi terlaksana kegiatan AGTP	1 Provinsi terlaksana kegiatan AGTP				
			1 Provinsi terlaksananya kegiatan NITP	1 Provinsi terlaksananya kegiatan NITP				
			1 laporan hasil evaluasi Daerah Otonom baru	1 laporan hasil evaluasi Daerah Otonom baru	1 laporan hasil evaluasi Daerah Otonom baru	1 laporan hasil evaluasi Daerah Otonom baru	1 laporan hasil evaluasi Daerah Otonom baru	
			1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa	1 laporan hasil evaluasi otonomi khusus dan istimewa	
6. Jumlah hasil laporan evaluasi daerah berotonomi khusus/ istimewa			100%	100%	100%	100%	100%	
7. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan DPOD			100%	100%	100%	100%	100%	
8. Jumlah Strategy Dasar Penataan Daerah (KK 1.1) (PN)			100%	100%	100%	100%	100%	
9. Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 (PN)			100%	100%	100%	100%	100%	
10. Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah (PN)			0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)	0 (nol)	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1) 5. Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga	(2) Meningkatnya Kapasitas Daerah dan pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; kinerja Kepala Daerah dan DPRD; kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD; kualitas regulasi Pilkada serta Hubungan antar lembaga/asosiasi daerah	(3) 1. Jumlah Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD 2. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pilkada	(4) - 1 Naskah Akademis; - 1 Penerbitan PP tentang Kewenangan Gub. selaku Pemerintah Pusat; - 1 Penerbitan PP tentang Tata Tertib DPRD; - 1 Instrumen evaluasi Kepala daerah dan DPRD	(5) 1 instrumen peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota	(6) 1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota	(7) 1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota	(8) 1 instrumen/ kebijakan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD Kab/Kota	(9) DIREKTORAT FASILITASI KDH, DPRD DAN HAL
			7 prov terfasilitasi dim pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur	8 prov terfasilitasi dim pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur	4 prov terfasilitasi dim pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur	13 prov terfasilitasi dim pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur	1 prov terfasilitasi dim pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur	
			202 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati	51 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati	37 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati	91 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati	15 kab terfasilitasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati	
			35 kota terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wakil WK 33 Provinsi, Tersosialisasikan PP tentang tatib DPRD	8 kota terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wakil WK 33 Provinsi, Tersosialisasikan PP tentang tatib DPRD	16 kota terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wakil WK 33 Provinsi, Tersosialisasikan PP tentang tatib DPRD	27 kota terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wakil WK 33 Provinsi, Tersosialisasikan PP tentang tatib DPRD	7 kota terfasilitasi dalam pemilihan Walikota/Wakil WK 33 Provinsi, Tersosialisasikan PP tentang tatib DPRD	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3.		Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan. (PB)	5 Kepala daerah kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi (165 KDH).	113 Kepala daerah di kabupaten/kota	56 Kepala Daerah di kab/kota	56 Kepala Daerah di kab/kota	70 Kepala Daerah di kab/kota	(9)
			5 Pimpinan DPRD Kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi (165 Pimpinan DPRD).	326 Pimpinan DPRD di kabupaten/kota	-	-	-	
			33 Pimpinan DPRD provinsi	-	-	-	-	
			33 Kepala daerah provinsi	-	-	-	-	
			-	-	1 Laporan	-	-	
4.		Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD (PB)	-	-	-	-	-	
5.		Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan. (PB)	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	165 Komisi DPRD di kabupaten/kota	161 Komisi DPRD kabupaten/kota	-	-	
6.		Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD (PB)	-	-	1 Laporan	-	-	
7.		Jumlah penyelesaian administrasi pemberian dan pengangkatan Kepala daerah serta peresmian pemberhentian dan pengangkatan DPRD	7 Gubernur, 202 Bupati, 35 Walikota	8 Gubernur, 51 Kabupaten, 8 Walikota.	4 Gubernur, 37 Bupati, 16 Walikota	13 Gubernur, 91 Bupati, 37 Walikota	1 Gubernur, 15 Bupati, 7 Walikota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
8. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, sosialisasi) hubungan antar lembaga, kelembagaan dan ketatalaksanaan daerah, kemitraan eksekutif legislatif dan asosiasi daerah	(2)	(3)	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan hubungan antar lembaga ketatalaksanaan daerah	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan hubungan antar lembaga ketatalaksanaan daerah	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan hubungan antar lembaga ketatalaksanaan daerah	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan hubungan antar lembaga ketatalaksanaan daerah	33 Provinsi terfasilitasi dalam penataan hubungan antar lembaga ketatalaksanaan daerah	(9)
			15 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif	33 Daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif	33 daerah terbina dalam peningkatan hubungan eksekutif dengan legislatif	
			7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota asosiasi daerah	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota asosiasi daerah	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota asosiasi daerah	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota asosiasi daerah	7 (tujuh) asosiasi daerah terbina dalam peningkatan kapasitas pengurus dan anggota asosiasi daerah	
			100%	-	-	-	-	
			-	1 UU	-	-	-	
9. Persentase revisi terbatas UU 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada (KK 2.1)								
10. Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KK 2.4)								
11. Jumlah kajian mengenai Gubernur dipilih melalui DPRD (KK 2.2)			1 Dokumen	-	-	-	-	
12. Kajian terkait dengan posisi dan Pemilihan Wakil KDH (KK 2.3)			1 Dokumen	-	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
6. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	(2) Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Pemerintahan Daerah, serta terlaksananya evaluasi kinerja dan pembinaan penyusunan evaluasi dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	(3) 1. Jumlah pedoman/kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	(4) 1. Peraturan Presiden	(5) Review PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(6) 3. Perubahan Permendagri EKKPD, EKPOD dan EDOB	(7)	(8)	(9) DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH
			4. Permendagri Tatacara EKKPD, EKKPOD, EDOB, Pemberian Penghargaan	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah	SE MDN Manual Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah	
		2. Jumlah provinsi usia diatas 10 tahun yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	26 Provinsi	28 Provinsi	30 Provinsi	32 provinsi	33 Provinsi	
		3. Jumlah Kabupaten /kota usia diatas 10 tahun yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	293 Kab/Kota	393 Kab/Kota	443 Kab/Kota	541 Kab/Kota	568 kab/Kota	
		4. Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) usia diatas 3 tahun s/d 10 tahun yang dievaluasi kinerjanya.	148	128	155	155	155	
		5. Jumlah provinsi otonomi khusus/istimewa yang dievaluasi kinerjanya	5	5	5	5	5	
		6. Jumlah kab/kota di daerah otonomi khusus/ istimewa yang dievaluasi kinerjanya	74	74	74	74	74	
		7. Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase meningkatnya pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan dengan Kementerian/Kelembagaan dan Gubernur	50%	60%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		9. Persentase daerah yang meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah (PB)	60%	70%	80%	85%	90%	
		10. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, supervisi dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD, EKPOD, EDOB))	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam tatacara evaluasi mandiri (self assesment)	
			100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu dan LHE	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu dan LHE	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu dan LHE	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu dan LHE	100 % Anggota Timda Provinsi, terfasilitasi dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi individu dan LHE	
			Peringkat Sementara 399 kabupaten dan 98 kota	Peringkat Sementara 399 kabupaten dan 98 kota	Peringkat Sementara 399 kabupaten dan 98 kota	Peringkat Sementara 399 kabupaten dan 98 kota	Peringkat Sementara 399 kabupaten dan 98 kota	
			33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD	33 Provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota terfasilitasi dalam pengumpulan data awal EKPOD	
			100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	
			100 % BinteK Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	100 % BinteK Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	100 % BinteK Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	100 % BinteK Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	100 % BinteK Tata cara Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Data Kemampuan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	
			100 % BinteK Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dan 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota	100 % BinteK Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dan 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota	100 % BinteK Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dan 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota	100 % BinteK Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dan 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota	100 % BinteK Pengumpulan Data Kemampuan Daerah dan 33 Provinsi 399 Kabupaten dan 98 Kota	
			100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	100 % tefasilitasi Bintek EDOB usia diatas 3 tahun	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		11. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, supervisi dan sosialisasi) pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas daerah	33 Prov. 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, bintek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah	33 Prov. 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, bintek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah	33 Prov. 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, bintek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah	33 Prov. 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, bintek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah	33 Prov. 399 kab 98 kota terfasilitasi melalui pembinaan, bintek dan Supervisi Fasilitasi Pengembangan kapasitas daerah	(9)
		12. Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD, EKPOD).	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah 10 Provinsi dan 37 Kab/Kota terfasilitasinya dalam Pelaksanaan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi (SCBD)	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah 10 Provinsi dan 37 Kab/Kota terfasilitasinya dalam Pelaksanaan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi (SCBD)	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah	100 % tersusun dokumen Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah	
			524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE Pemeringkatan provinsi dan Kab/Kota secara Nasional	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE Pemeringkatan provinsi dan Kab/Kota secara Nasional	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE Pemeringkatan provinsi dan Kab/Kota secara Nasional	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE Pemeringkatan provinsi dan Kab/Kota secara Nasional	524 Dokumen LHE Individu & 1 Dokumen LHE Pemeringkatan provinsi dan Kab/Kota secara Nasional	
			100 % terkumpul dokumen Data awal/T-O provinsi dan kab/kota	100% Tersusun Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Data awal/T-O Provinsi dan kab/kota	100% Tersusun Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Data awal/T-O Provinsi dan kab/kota	100% Tersusun Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Data awal/T-O Provinsi dan kab/kota	100% Tersusun Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Data awal/T-O Provinsi dan kab/kota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
			100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun	100 % tersusun doku men Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun	100 % tersusun doku men Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun	100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun	100 % tersusun dokumen Laporan Hasil EDOB berusia diatas 3 tahun	(9)
			1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen Daerah yang mendapat penghargaan Para Samya Purna karya Nugraha atas Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		13. Cakupan pembinaan dan fasilitasi (koordinasi, bintek, advokasi dan sosialisasi) penyusunan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 provinsi terbina dalam penyusunan LPPD	33 provinsi terbina dalam penyusunan LPPD	100%	100%	100%	
		14. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota yang disampaikan sesuai jadwal	40%	60%	80%	90%	100%	

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi Pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah	1. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung (KK 3.1) (PN)	30%	40%	50%	55%	60%	DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
		2. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (KK 3.2)	1 Paket	-	-	-	-	
		3. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (KK 17)	1 Permendagri	-	-	-	-	
		4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)	60%	70%	80%	85%	90%	
		5. Presentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi (PB)	44,5 %	45 %	45,5 %	46 %	48 %	
		6. Persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota (PB)	4,6 %	7,3 %	7,5 %	7,8 %	11,8 %	
		7. Persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan kekayaan daerah terhadap total PAD (PB)	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		8. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan daerah dan investasi daerah (PB)	0%	20%	30%	40%	50%	
		9. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian/lembaga (PN)	70 %	90 %	95 %	100 %	100 %	
		10. Jumlah Kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya (PN)	6 Permendagri - 2 SE	2 Permendagri - 1 SE	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	
		11. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (PN)	15% dari seluruh provinsi, dan kabupaten/kota	30%	50%	75%	100%	
		12. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)	40%	60%	70%	80%	90%	
		13. Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi se-Indonesia (PN)	26%	27%	28%	29%	30%	
		14. Persentase K/L yang dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis DAK (paling lambat April) (PN)	-	90%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SEKRETARIAT DITJEN KEUANGAN DAERAH
		2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeliharaan dan tindak lanjut LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		3. Jumlah Pedoman/Juknis lingkup Ditjen Keuda yang diselesaikan Persentase penyelesaian dokumen/juknis (SOP, pedoman lainnya)	1 pedoman					
		4. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Keuangan Daerah	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
		6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	85 %	86 %	87 %	88 %	90 %	
		7. Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan Ditjen Keuangan Daerah	-	75%	80%	85%	90%	
		8. Persentase penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset sesuai SIMAK BMN	-	100%	100%	100%	100%	
		9. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Pembinaan Anggaran Daerah	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang anggaran daerah yang dapat diimplementasikan di daerah.	10. Persentase capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	-	82%	84%	86%	88%	DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH
		11. Persentase Dukungan Data Keuangan Daerah	-	-	100%	100%	100%	
		1. Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang anggaran daerah (PN)	- 2 PP - 7 Permendagri - 66 Kepmendagri - 1 SE	- 2 PP - 3 Permendagri - 66 Kepmendagri - 5 SE	- 1 Permendagri - 66 Kepmendagri	- 1 Permendagri - 66 Kepmendagri	- 1 Permendagri - 66 Kepmendagri	
		2. Persentase daerah provinsi yang mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang anggaran daerah	80 %	82 %	87%	92%	95%	
		3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	91%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung (PN)	30%	40%	50%	55%	60%	
		5. Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah provinsi se-Indonesia (PN)	26%	27%	28%	29%	30%	
		6. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)	60%	70%	80%	85%	90%	
		7. Persentase penyelesaian dokumen profil APBD provinsi/ dan kabupaten/kota	-	-	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan daerah dan Investasi Daerah	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah yang dapat diimplementasikan di daerah	1. Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah	- 1 UU, 1 PP - 19 Permendagri - 1 SE MDN	- 4 Permendagri - 4 Kepmendagri - 1 Perber - 4 SE	- 2 Permendagri - 4 Kepmendagri - 2 SE	- 3 Permendagri - 4 Kepmendagri - 3 SE	- 1 Permendagri - 4 Kepmendagri - 2 SE	DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DAN INVESTASI DAERAH
		2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan PDID	80 %	82 %	84 %	86 %	90 %	
		3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
		4. Persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota (PB)	4,6 %	7,3 %	7,5 %	7,8 %	11,8 %	
		5. Persentase rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi (PB)	44,5 %	45 %	45,5 %	46 %	48 %	
		6. Persentase rata-rata hasil penerimaan Investasi dan kekayaan daerah terhadap PAD (PB)	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	
		7. Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah (PB)	0%	20%	30%	40%	50%	
		8. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (KK 17)	1 Permendagri	-	-	-	selesai	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
								(9)
		9. Persentase penyajian dukungan materi dan evaluasi Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah	-	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah daerah/SKPD atau unit kerja SKPD yang difasilitasi dalam menerapkan PPK BLUD	-	200 daerah	250 daerah	350 daerah	425 daerah	
		11. Persentase penyelesaian Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terhadap usulan pinjaman daerah	-	90%	90%	90%	90%	
4. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer yang dapat diimplementasikan di daerah	1. Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (PN)	6 Permendagri 2 SE	2 Permendagri 1 SE	1 Permendagri	1 Permendagri	1 Permendagri	DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN
		2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang Fasilitasi Dana Perimbangan	80 %	82 %	84 %	86 %	90 %	
		3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada direktorat fasilitasi dana perimbangan yang tepat waktu	91%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian lembaga (PN)	70 %	90 %	95 %	100 %	100 %	
		5. Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK (PN)	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pelaksanaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah	6. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (KK. 3.2) (PB)	1 paket	-	-	-	-	-
		7. Jumlah dokumen rekomendasi penyaluran dana otsus dan infrastruktur di Papua, Papua Barat dan NAD.	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi	9 rekomendasi
		8. Persentase penyelesaian Dokumen Profil Dana Perimbangan	91%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Jumlah Dokumen Berita Acara Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan DBH SDA dengan Kementerian Teknis	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		10. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi K/L yang dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis DAK (April)	-	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	33 Kepmendagri 1 SE	33 Kepmendagri 1 Permendagri / pedoman (akrual)	33 Kepmendagri 2 1 Permendagri	33 Kepmendagri 1 Permendagri	33 Kepmendagri 1 SE	DIREKTORAT PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DAERAH
		2. Persentase daerah yang mampu mengimplementasikan kebijakan/regulasi di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	15% dari seluruh provinsi/ kabupaten/kota	82%	84%	86%	90%	
		3. Koordinasi kegiatan Local Government Finance Governance Reform (LGFR)	5 Paket	-	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4. Persentase pembangunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapannya pada 171 daerah uji coba	75 %	-	-	-	-	
		5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	91%	100%	100%	100%	100%	
		6. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (PN)	15% dari seluruh provinsi, dan kabupaten/kota	30%	50%	75%	100%	
		7. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (PN)	40%	60%	70%	80%	90%	
		8. Persentase kumulatif daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan penerapannya di daerah	33% dari jumlah Prov/Kab/kota	40% dari jumlah Prov/Kab/Kota	50% dari jumlah Prov/Kab/Kota	60% dari jumlah Prov/Kab/Kota	80% dari jumlah Prov/Kab/Kota	
		9. Persentase pemberian bantuan keterampilan ahli di bidang keuangan daerah	-	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Tingkat kesesuaian antara RPJPD dengan RPJPN; RPJMD dengan RPJMN; RAKPD dengan RPJMD, RAKPD dengan RKP; KUA, PPAS, APBD dengan RAKPD provinsi	20%	40%	60%	80%	90%	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	60%	90%	90%	100%	100%	
		3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemrioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya.	2	6	8	10	10	
		4. SPIPISE dapat diterapkan di PTSP daerah (KK-12)	10%	20%	30%	40%	60%	
		5. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP (KK 12)	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta (KK 5.2)	-	1 Paket	1 Per-UU-an	1 Per-UU-an	1 Per-UU-an	
		7. Jumlah daerah yang terfasilitasi penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov (KK 7.3)	-	15 Prov	33 Prov	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	(2)	8. Jumlah daerah yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (KK 10.2)	-	15 Prov	23 Prov	30 Prov	33 Prov	(9)
		9. Jumlah Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif (KK 10.1)	-	23 Prov	26 Prov	30 Prov	33 Prov	
		10. Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP (KK 10.3)	30%	40%	60%	75%	100%	
		11. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Prov, RTRW Kabupaten/Kota (KK 10.4)	1	1	1	1	1	
		12. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen (KK 10.5)	50%	70%	80%	90%	95%	
		1. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DITJEN BINA BANGDA
		2. Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Serta Hasil Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut LHP	75%	80%	85%	95%	100%	
		3. Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Bina Bangda	70%	70%	100%	100%	100%	
		Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bangda						

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		4. Jumlah pegawai dan tamu yang memanfaatkan/mengakses Perpustakaan Bangda/e-library	1000	1200	1400	1600	1800	
		5. Jumlah Laporan Keuangan yg Sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
		6. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Bina Bangda	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeriharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan.	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengendalian, pelaporan dan evaluasi pemanfaatan DAK dan TP	-	-	32 Prov	32 Prov	32 Prov	
		10. Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan	-	-	132 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP	116 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP	82 Kab/Kota DAK, 25 Kab/Kota TP	
		11. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	-	75%	75%	80%	85%	
		12. Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		13. Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda	-	-	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		14. Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah melalui Dana Dekonsentrasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIDP)			90 %	100%	100%	
2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	10%	40%	100%	100%	100%	DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Persentase daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah	10%	40%	100%	100%	100%	
		3. Persentase fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Dan Renja SKPD) yang serasi dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi.	10%	40%	100%	100%	100%	
		4. Persentase Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan rencana serta hasil rencana pembangunan daerah	10%	40%	100%	100%	100%	
		5. Persentase konsistensi perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, KUA, PPAS dan APBD) berdasarkan hasil evaluasi perda tentang APBD provinsi	10%	40%	60%	80%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3. Fasilitas Pengembangan Wilayah Terpadu	Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya	6. Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota	30%	40%	60%	80%	90%	DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH
		7. Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	30%	50%	75%	80%	100%	
		8. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
		1. Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah di bidang pengembangan wilayah	2	2	2	2	3	
		2. Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan wilayah	-	33 Prov	33 Prov	33 Prov + 1 Paket Indeks Wilayah Tertinggal (IWT)	33 Prov + IWT	
		3. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah di region Sumatera dan Kalimantan	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan	14 Provinsi Region Sumatera dan Kalimantan	
		4. Persentase implementasi kebijakan pengembangan wilayah tertinggal	20%	40%	60%	80%	90%	
		5. Jumlah Pemda yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan di region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	19 Provinsi Region Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	
		6. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	2 Prov	10 Prov	18 Prov	25 Prov	30 Prov	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		7. Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	-	75 Kab/Kota	100 Kab/Kota	150 Kab/Kota	200 Kab/Kota	(9)
		8. Persentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) serta kerjasana wilayah	20%	40%	60%	80%	90%	
		9. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pengembangan Wilayah Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah daerah yang menerapkan pedoman/ kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (PB)	-	75 Kab/Kota	100 Kab/Kota	150 Kab/Kota	200 Kab/Kota	
		11. Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (PB)	1 pedoman	2 pedoman	3 pedoman	4 pedoman	5 pedoman	
		12. Jumlah wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan & pulau-pulau kecil (PB)	-	2 Prov	4 Prov	5 Prov	5 Prov	
		13. Persentase Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW (9 Provinsi, 34 kabupaten) (PN)	20%	40%	60%	80%	90%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Fasilitas Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak, konsolidasi kebijakan penanaman dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, dukungan Reformasi bidang pelayanan umum, serta meningkatnya tertib pemanfaatan ruang daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	14. Jumlah wilayah perbatasan yang difasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi (PB)	-	6 Prov	6 Prov	-	-	-
		1. Persentase tersusunya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD (KK 7.1)	100%	-	-	-	-	-
		2. Jumlah BKPRD Provinsi terrevitalisasi (KK 7.2)	-	15 Prov	23 Prov	30 Prov	33 Prov	DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3. Jumlah daerah yang terfasilitasi penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov (KK 7.3) (PB)	-	15 Prov	33 Prov	-	-	-
		4. Persentase tersusunya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi (KK 7.4)	40%	100%	-	-	-	-
		5. Persentase Tersusunya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah (KK 7.5)	100%	-	-	-	-	-
		6. Persentase Tersusunya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang.	70%	100%	-	-	-	-
		7. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW secara konsekuen (KK 10.5)	-	23 Prov	26 Prov	30 Prov	33 Prov	-
		8. Jumlah Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif (KK 10.1)	-	23 Prov	26 Prov	30 Prov	33 Prov	-
		9. Jumlah Daerah yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (KK 10.2)	-	15 Prov	23 Prov	30 Prov	33 Prov	-

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		10. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah (KK 16.2)		2 Pedoman				
		11. Jumlah Kebijakan Terkait Dengan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup Di Daerah	1	2	4	6	8	
		12. Persentase Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi FPRH	30%	40%	60%	70%	100%	
		13. Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	50%	60%	75%	85%	100%	
		14. Jumlah daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait pemanfaatan dan pengendalian SDA	4 Prov, 15 Kab/Kota	6 Prov, 27 Kab/Kota	8 Prov, 50 Kab/Kota	10 Prov, 75 Kab/Kota	14 Prov, 101 Kab/Kota	
		15. Persentase Peningkatan Peran Kelembagaan dan Koordinasi Penataan Ruang	30%	60%	70%	80%	90%	
		16. Persentase Daerah yang mengimplementasikan Pedoman/kebijakan Terkait Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	50%	60%	75%	85%	100%	
		17. Jumlah provinsi yang mengimplementasikan Pedoman/kebijakan Terkait Penataan Wilayah Pengembangan Khusus		2 prov	5 prov	8 prov %	12 prov	
		18. Persentase daerah yang telah menetapkan PERDA Rencana Tata Ruang Daerah (rencana umum dan rencana rinci tata ruang)	30%	60%	70%	80%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		19. Persentase Daerah yang telah menetapkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	50%	60%	75%	85%	100%	
		20. Persentase Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		21. Persentase pelayanan Administrasi dan tugas teknis lainnya pada Dit. Fasilitas Penataan Ruang dan LH	100%	100%	100%	100%	100%	
		22. Jumlah daerah yang terfasilitasi kelembagaan irigasinya	-	-	15 provinsi 134 kabupaten/kota	15 provinsi 134 kabupaten/kota	15 provinsi 134 kabupaten/kota	
		23. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penanganan lahan kritis dan perubahan perilaku masyarakat berbasis DAS	-	-	1 Prov 5 Kab/Kota	1 Prov 10 Kab/Kota	1 Prov 13 Kab/Kota	
		24. Jumlah provinsi yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait penataan ruang kawasan	-	-	5 Prov	8 Prov	12 Prov	
		25. Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata	-	-	9 Prov	13 Prov	17 Prov	
		26. Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata daerah	-	-	9 Prov	9 Prov	9 Prov	
		27. Jumlah daerah terfasilitasi dalam pengembangan kebun raya daerah	-	-	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		28. Jumlah provinsi yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan ekowisata berbasis masyarakat	-	4 Prov	9 Prov	13 Prov	17 Prov	
		29. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RAD AMPL	-	35 Kab/Kota	70 Kab/Kota	70 Kab/Kota	-	
		30. Jumlah daerah yang mengaplikasikan kriteria kawasan ekowisata	-	-	3 Prov	7 Prov	10 Prov	
		31. Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat (PB)	1 PP	-	-	-	-	
		32. Jumlah Penyusunan NSPK Penataan Ruang Daerah (PB)	3 Permendagri	4 Permendagri	4 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	
		33. Peningkatannya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (PB)	30% daerah	60% daerah	70% daerah	80% daerah	90% daerah	
		34. Jumlah BKPRD yang terbentuk (PB)	11 provinsi	22 provinsi	33 provinsi	-	-	
		35. Terselenggaranya Rakernas BKPRN. (PB)	-	-	-	1 kegiatan	-	
		36. Terselenggaranya Raker BKPRD. (PB)	2 kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 kegiatan	
		37. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah (PB)	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	
		38. Jumlah daerah yang difasilitasi melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang (PB)	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Fasilitas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, Private Public Partnership, serta terlaksananya implementasi Sistem Informasi Perijinan SIPIPISE pada PTSP di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis	39. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang. (PB)	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	(9)
		40. Jumlah fasilitas kelembagaan KLHS secara terpadu ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
		1. Jumlah Kebijakan Terkait Dengan Pengembangan Potensi, Promosi dan Perbaikan Usaha/Investasi di Daerah Kerjasama, Kelembagaan dan Dukungan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah (mendukung Starting of Bussiness 40 Days)	2	1	2	2	2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
		2. Jumlah tingkat ketersediaan data dan informasi ekonomi daerah Daerah	8 Prov	8 Prov	8 Prov	8 Prov	9 Prov	
		3. Persentase SIPIPISE dan peraturan pelaksanaannya dapat diterbitkan (KK-12)	100%	-	-	-	-	
		4. Jumlah daerah yang membentuk PTSP. (KK-12) (PN)	143 Kab/Kota	212 Kab/ Kota	265 Kab/ kota	318 Kab/ Kota	371 Kab/ Kota	
		5. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE (KK-12) (PN)	-	153 Kab/kota	212 Kab/ Kota	265 Kab/ Kota	318 Kab/ Kota	
		6. Jumlah PTSP yang mengimplementasikan SIPIPISE (KK-12)	-	153 Kab/Kota	212 Kab/ Kota	265 Kab/ Kota	318 Kab/ Kota	
		7. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan TDP dan SIUP (KK 12) (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		8. Persentase daerah yang mampu menerapkan kebijakan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha (KK 12) (PB)	30%	40%	50%	60%	70%	
		9. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Prov, Kabupaten/Kota di Indonesia (KK 5.1)	100%	-	-	-	-	
		10. Jumlah PTSP kab/kota dengan kinerja baik	-	100 Kab/Kota	125 Kab/Kota	150 Kab/Kota	175 Kab/Kota	
		11. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta (KK 5.2)	-	1 Paket	1 Per-Uuan	1 Per-Uuan	1 Per-Uuan	
		12. Persentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi, Promosi, Kerjasama, Serta Kelembagaan Dan Dukungan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Persentase penyelesaian administrasi surat menyurat dan dokumentasi secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	
		14. Jumlah regulasi/kebijakan/pedoman yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah (PB)	1 pkt	2 pkt	3 pkt	4 pkt	5 pkt	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		15. Jumlah SOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services)/ PTSP, termasuk dikawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya (PB)		2 SOP /Institusi/UPT	3 SOP /Institusi/UPT	4 SOP /Institusi/UPT	5 SOP /Institusi/UPT	
		16. Jumlah dokumen data/info yang tersedia terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah (PB)	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
		17. Jumlah desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah (PB)	1 pkt	2 Pkt	3 Pkt	4 Pkt	5 Pkt	
		18. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah (PB)	15prov/kab/Kota	18 prov/kab/kota	20 prov/kab/kota	23 prov/kab/kota	25 prov/kab/kota	
		19. Jumlah workshop Desiminasi/studi Banding mengenai Pengembangan ekonomi lokal dan daerah (PB)	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	
		20. Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif (PB)	1 pkt	2 Pkt	3 Pkt	4 Pkt	5 Pkt	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		21. Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya (PB)	1	3	3	3	3	
		22. Jumlah lembaga fasilitasi di daerah provinsi (PB)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
		23. Fasilitasi rencana pengembangan unggulan daerah (PB)	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	
		24. Jumlah forum kerjasama antar daerah yang terbentuk (PB)	-	9 forum	17 forum	25 forum	33 forum	
		25. Jumlah sektor bidang yang dikerjasamakan (PB)	-	9 Bidang	17 Bidang	25 Bidang	33 Bidang	
		26. Cakupan jumlah MoU PPP (PB)	-	-	1 dokumen hasil kajian pelaksanaan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah bersama swasta.	1 dokumen tindak lanjut berupa inventarisasi jumlah daerah yang bermitra dengan swasta.	1 dokumen pengembangan jumlah daerah yang bermitra dengan swasta.	
		27. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam kaitan kerjasama dengan AIP Ausaid, Care Int, Plant Int, dan CHF Int (PB)	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama dim rangka mendorong pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan Ausaid)	19 Provinsi	19 Provinsi	21 Provinsi	23 Provinsi	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		28. Jumlah pedoman umum kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan di daerah	-	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	(9)
		29. Jumlah instrumen kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan	-	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	
		30. Jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan swasta	-	-	7 Prov	14 Prov	21 Prov	
		31. Jumlah kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional (PB)	1	-	-	-	-	
		32. Jumlah daerah yang telah membentuk dan melaksanakan Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	-	15 Prov	20 Prov	25 Prov	33 Prov	
		33. Jumlah Regulasi/ Kebijakan/Pedoman yang disusun dan disahkan untuk mendukung modal sosial, rencana aksi, instrumen money FPED serta penentuan pemeringkatan Pengemb. Ekonomi Daerah	-	3 Kebijakan	4 Kebijakan	5 Kebijakan	6 Kebijakan	
		34. Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam upaya stabilisasi sektor-sektor strategis	-	-	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	60 Kab/Kota	
		35. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah	-	-	22 Kab/Kota	44 Kab/Kota	66 Kab/Kota	
		36. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Fasilitasi Penataan Perkotaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perkotaan	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan perencanaan Dit. Penataan Perkotaan	2	1	5	5	5	DIREKTORAT PENATAAN PERKOTAAN
		2. Jumlah rapat kerja Dit. Penataan Perkotaan	-	1	4	4	4	
		3. Jumlah dokumentasi visual pelaksanaan prog/keg Dit. Penataan Perkotaan	-	1	1	1	1	
		4. Jumlah kegiatan penguatan kapasitas Dit. Penataan Perkotaan	-	1	3	3	3	
		5. Persentase fasilitasi pembentukan pengelola perkotaan dan badan pengelola pembangunan kawasan perkotaan baru	20%	40%	-	-	-	
		6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kinerja	1	1	1	1	1	
		7. Persentase dokumen administrasi surat menyurat, penyusunan program dan laporan kinerja/atahun serta dokumentasi terselamatkan Dit. Perkotaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Jumlah naskah akademis peraturan perundangan ttg perkotaan (KSPN) (PB)	-	1	-	-	-	
		9. Jumlah rancangan peraturan perundangan tentang perkotaan (KSPN) (PB)	-	-	1	-	-	
		10. Jumlah peraturan perundangan tentang perkotaan(PB)	-	-	-	1	-	
		11. Jumlah kebijakan/pedoman tentang forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi	-	1 Pedoman	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		12. Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan koridor ekonomi	1 dokumen data tipologi kawasan perkotaan	-	9 Kawasan Metropolitan	9 Kawasan Metropolitan	9 Kawasan Metropolitan	(9)
		13. Jumlah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi MBR (PB)	5 Kab/Kota	10	10 kota besar/ metropolitan	10	10	
		14. Jumlah kebijakan/pedoman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan	-	1	-	-	-	
		15. Jumlah pedoman peningkatan peran PKL dan permajaaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PB)	-	1 Permendagri	-	-	Sudah terlaksana	
		16. Jumlah personil Pemda dan masyarakat yang mengikuti training mengenai pedoman peningkatan peran PKL dan permajaaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PB)	-	100	100	100	100	
		17. Jumlah kebijakan/pedoman kemendagri terkait dengan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan (PB)	1 Rancangan Permendagri	1 Permendagri	-	-	-	
		18. Jumlah prov, Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular (PB)	5 provinsi dan 20 Kabupaten/Kota	7 provinsi dan 30 kab/kota	7 provinsi dan 30 kab/kota	7 provinsi dan 30 kab/kota	7 provinsi dan 30 kab/kota	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		19. Jumlah pedoman penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan (PB)	-	1 pedoman	-	-	-	(9)
		20. Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi (PB)	20	50	100	150	200	
		21. Jumlah naskah akademis pengelolaan perkotaan	-	1 Dokumen	-	-	-	
		22. Jumlah pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan(PB)	-	-	1 Pedoman	-	-	
		23. Jumlah sosialisasi pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan (PB)	-	-	10 Kab/Kota	-	-	
		24. Jumlah kota yang terfasilitasi dalam penyusunan perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan (PB)	5	10	-	15	15	
		25. Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruh Indonesia. (PB)	1	-	-	-	-	
		26. Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan (PB)	1	20	40	40	50	
		27. Jumlah Kabupaten/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan (PB)	40	60	40	40	50	
		28. Jumlah pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan (PB)	1 ranc.pedoman	-	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		29. Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan Koridor Ekonomi (PB)	-	-	9 Kawasan Metropolitan	9 Kawasan Metropolitan	9 Kawasan Metropolitan	
		30. Jumlah kota yang difasilitasi dalam penyediaan pola pengelolaan kawasan perkotaan (PB)	1 Rancangan pedoman	-	5	5	5	
		31. Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan (PB)	49	62 Kab/Kota	72 Kab/Kota	82 Kab/Kota	100 Kab/Kota	
		32. Jumlah kebijakan/pedoman kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PB)	-	1	-	-	-	
		33. Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan (PB)	2 Best Practice	4 Best Practice	-	-	-	
		34. Jumlah Kerjasama City Sharing (PB)	10 Kab/kota	10 Kab/Kota	-	-	-	
		35. Jumlah kerjasama sister city yang berjalan (terlaksana) (PB)	4 Kab/Kota	10	24	24	24	
		36. Jumlah Kerjasama Sister City (PB)	4 Prov/Kab/Kota	4 Prov/Kab/Kota	-	-	-	
		37. Jumlah pedoman kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (PB)	-	-	-	1	-	
		38. Jumlah fasilitasi kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga (PB)	-	-	-	-	10	
		39. Jumlah fasilitasi revitalisasi Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. (PB)	-	2	5	2	2	
		40. Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun secara memadai (PB)	2	7	5	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		41. Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan (PB)	1 Dokumen	-	-	-	-	-
		42. Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan (PB)	10 Kawasan Perkotaan	20 Kawasan Perkotaan	40 Kawasan Perkotaan	60 Kawasan Perkotaan	80 Kawasan Perkotaan	-
		43. Jumlah kota yang terfasilitasi dalam penyusunan pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di kota-kota dalam kawasan metropolitan (PB)	5	15	15	15	15	-
		44. Jumlah kota yang difasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah (PB)	-	50	50	50	50	-
		45. Jumlah kebijakan/pedoman SPP (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan) (PB)	1 Permendagri	1 Kebijakan permendagri mengenai Pedoman SPP	-	-	1	-
		46. Jumlah prov, Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam penyediaan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP (PB)	2 Kabupaten/ Kota di 1 provinsi	4 Kabupaten/ Kota di 2 provinsi	25 kota di 10 provinsi	20 kota di 5 provinsi	20 kota di 5 provinsi	-
		47. Jumlah kegiatan sinkronisasi SPP dan SPM (PB)	-	-	1 Kegiatan	-	-	-
		48. Jumlah penghargaan IMP (PB)	15	25	-	-	-	-
		49. Jumlah sistem penilaian IMP Award yang disempurnakan (PB)	-	1	-	1	-	-

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		50. Jumlah kawasan perkotaan yang dievaluasi dibanding pengembangan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) (PB)	1	1	10	-	25	
		51. Jumlah Prov. Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda (PB)	5 prov.10 Kabupaten/Kota	5 prov. 10 kab/kota	5 prov. 10 kab/kota	5 prov. 10 kab/kota	5 prov. 10 kab/kota	
		52. Jumlah prov. Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah (PB)	4 Kab/Kota	10 kab/kota dari 3 provinsi	10 kab/kota dari 3 provinsi	10 kab/kota dari 3 provinsi	10 kab/kota dari 3 provinsi	
		53. Jumlah kebijakan/dokumen tentang standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan (PB)	5 Prov. 10 Kab/Kota	1 Pedoman	-	-	1	
		54. Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi untuk penyusunan perda terkait RTH di kawasan perkotaan (PB)	4 Kab/Kota	4	6	8	10	
		55. Jumlah daerah yang terfasilitasi untuk penyusunan perda ttg pemberian IMB. (PB)	10 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	25 Kab/Kota	50 Kab/Kota	
		56. Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan (PB)	10 Prov/Kab/kota	20 Prov/Kab/kota	30 Prov/Kab/Kota	440 Prov/Kab/Kota	Prov/Kab/ Kota	
		57. Jumlah pedoman koor-dinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan (PB)	-	1 Permendagri	-	-	1	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		58. Jumlah koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (PB)	3	5	5	5	5	
		59. Jumlah kota yang diidentifikasi, fasilitasi dan sosialisasi dalam DAK tentang perkotaan (PB)	-	-	17 Kab/Kota dalam 4 kawasan metropolitan dan kota menengah	-	-	
		60. Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian perkotaan (PB)	1	1	1	-	3	
		61. Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional (PB)	4	6	10	10	10	
		62. Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional (PB)	1	3	5	10	10	

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis	1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui BinteK, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD	15 Provinsi 30` Kab	18 prov 64 Kab	22 Prov 110 Kab	26 Prov 130 Kab	32 Prov 192 Kab	DITJEN PMD
		2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan	1 RUU	-	-	-	-	
		3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	
		4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	33 prov 394 Kab	33 prov 400 kab	33 prov 415 kab	33 prov 425 kab	33 prov 468 kab	
		5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi (KK 13 1)	20 %	35 %	50 %	60 %	70 %	
		6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK 13 1)	20 pasar	35 pasar	50 pasar	60 pasar	70 pasar	
		7. Cakupan penerapan PNPW-MP (KK 13 2)	32 provinsi 394 kab, termasuk 50 kab tertinggal	32 provinsi 394 kab, termasuk 50 kab tertinggal	32 provinsi 393 kab, termasuk 50 kab tertinggal	32 provinsi 394 kab, termasuk 50 kab tertinggal	32 provinsi 394 kab, termasuk 50 kab tertinggal	
		8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab Nias dan Nias Selatan (KK 13 2)	2 Kab/ 9 Kecamatan	-	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan PNPMD Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)	8 provinsi, 23 kabupaten	8 provinsi, 12 kabupaten	8 provinsi, 12 kabupaten			
		10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara	15 kabupaten	25 kabupaten	35 kabupaten	40 kabupaten	50 kabupaten	
		11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemba Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu	33 prov 468 kab	33 prov 468 kab	33 prov 468 kab	33 prov 468 kab	33 prov 468 kab	
		12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (<i>Jatropha curcas</i> Lin)	14 desa	28 desa	45 desa	62 desa	80 desa	
		13. Jumlah Posyanteledes yang berfungsi	20	40	60	80	100	
		1. Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran yang direncanakan	Posyanteledes 100 % (12 Dok)	Posyanteledes 100 % (12 Dok)	Posyanteledes 100 % (11 Dok)	Posyanteledes 100 % (12 Dok)	Posyanteledes 100 % (12 Dok)	SESDITJEN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
		2. Jumlah laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
		3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Ditjen PMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		4. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		5. Persentase data aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan standar	100 % (1 Dok)	100 % (1 Dok)	100 % (1 Dok)	100 % (1 Dok)	100 % (1 Dok)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat	6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
		7. Jumlah Review kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman, permendagri	2 Paket	3 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
		8. Jumlah laporan monitoring dan program/kegiatan dipusat dan daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
		9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	75%	75%	77%	80%	82%	
		10. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang difasilitasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui BinteK, konsolidasi, inventarisasi (PB)	33 Prov 86 Kab	33 Prov 90 Kab	33 Provinsi 100 Kabupaten	33 Provinsi 100 Kabupaten	33 Provinsi 100 Kabupaten	
		2. Jumlah produk hukum tentang desa yang diselesaikan meliputi RUU dan produk hukum lainnya (PB)	-	1 RUU	4 Dokumen Produk Hukum Lainnya	-	-	
		3. Jumlah daerah yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui BinteK, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD (PB)	15 Provinsi 30 Kabupaten	18 Provinsi 64 Kabupaten	22 Provinsi 110 Kab	26 Provinsi 130 Kab	32 Provinsi 192 Kab	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat	4. Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penguasaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bintek dan koordinasi (PB)	8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa	16 Provinsi, 16 Kabupaten, 32 Desa	20 Provinsi, 40 Kabupaten, 80 Desa	24 Provinsi, 48 Kabupaten, 96 Desa	32 Provinsi, 64 Kabupaten, 128 Desa	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
		5. Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan (PB)	600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota	720 Orang dari 32 Provinsi, 22 Kab/Kota	800 Orang dari 32 Provinsi, 25 Kab/Kota	880 Orang dari 32 Provinsi, 28 Kab/Kota	1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota	
		6. Cakupan fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (PB)	15 Provinsi, 30 Kabupaten, 60 BPD	18 Provinsi, 64 Kabupaten, 128 BPD	22 Provinsi, 110 Kab, 32 Provinsi, 110 Kabupaten, 320 BPD	26 Provinsi, 130 Kab, 26 Provinsi, 130 Kabupaten, 260 BPD	32 Provinsi, 192 Kab, 32 Provinsi, 192 Kabupaten, 384 BPD	
		7. Jumlah kantor desa yang sudah dibangun dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat (PB)	-	20 kantor desa	20 kantor desa	40 kantor desa	40 kantor desa	
		1. Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT (PB)	12 Angkt, 480 orang dari 32 Prov	15 Angkt, 600 orang dari 32 Prov	18 Angkt, 720 orang dari 32 Prov	20 Angkt, 800 orang dari 32 Prov	25 Angkt, 1000 orang dari 32 Prov	
		2. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan potensi desa melalui Pendataan dan Penda- yagunaan Profil Pe- nyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan (PB)	33 prov, 394 Kab,	33 prov, 400 Kab	33 prov, 415 Kab/kota, 5 Desa, 5 Kelurahan	33 prov, 425 Kab/kota, 5 Desa, 5 Kelurahan	33 prov, 468 Kab/kota, 5 Desa, 5 Kelurahan	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi (PB)	32 Provinsi dan 12 Kabupaten	32 Provinsi dan 17 Kabupaten	32 Provinsi dan 22 Kabupaten	32 Provinsi dan 27 Kabupaten	32 Provinsi dan 32 Kabupaten	
		4. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi (PB)	10 Provinsi 10 Kab	15 Provinsi 20 Kab	15 Provinsi 30 Kab	20 Provinsi 40 Kab	25 Provinsi 50 Kab	
		5. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan (PB)	32 prov	32 prov	32 prov	32 prov	32 prov	
		6. Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi) (PB)	32 prov	32 prov	32 prov	32 prov	32 prov	
		7. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (PB)	-	32 prov	32 prov	32 prov	32 prov	
		8. Jumlah Kabupaten yang menyusun RTR desa (PB)	-	60 kab	60 kab	90 kab	120 kab	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar	1. Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulan kepada pemerhati adat dan budaya (PB)	15 Kab	25 Kab	47 Kab 32 Prov	40 Kab	50 Kab	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah (PB)	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	
		3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb Posyandu, pendataan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu (PB)	33 prov 468 kab	33 prov 468 kab	33 prov 314 kab/kota	33 prov 469 kab/kota	33 prov 469 kab/kota	
		4. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi (PB)	33 Prov 50 Kab	33 Prov 50 Kab	32 Prov 469 Kab	33 Prov 50 Kab	33 Prov 50 Kab	
		5. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan pendataan, bimtek, dan pemberantasan buta aksara (PB)	10 Provinsi 10 Kab	15 Provinsi 20 Kab	15 Provinsi 30 Kab	20 Provinsi 40 Kab	25 Provinsi 50 Kab	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar	6. Cakupan Penerapan PNPM MP Generasi (PB)	-	120 kec	120 kec	120 kec	120 kec	
		1. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kab/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) (PB)	33 Prov 15 Kab 6 Keg	33 Prov 20 Kab	33 Prov 33 Kab 7 Keg	33 Prov 30 Kab 7 Keg	33 Provinsi 20 Kabupaten 10 Keg	DIREKTORAT USAHA EKONOMI MASYARAKAT
		2. Jumlah kabupaten yang di fasilitasi dalam peningkatan pelaksanaan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir serta Penguatan Kelembagaan BUMKEL (PN)	15 Kab	25 Kab	35 Kab	40 Kab	50 Kab	
		3. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam usaha pengembangan ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW (PB)	33 Prov	33 Prov	9 Prov 34 Kabupaten	33 Prov	33 Prov	
		4. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bimtek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat (PB)	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	
		5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan /UED-SP yang berfungsi (KK 13.1) (PB)	20 %	35 %	50 %	60 %	70 %	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendaayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar	6. Jumlah provinsi dan kab/kota yang di fasilitasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD, stimulan kepada pasar desa	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	33 Provinsi 10 Kabupaten 50 Desa	33 Provinsi 10 Kabupaten 60 Desa	DIREKTORAT SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
		7. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK 13 1) (PB)	20 pasar	35 pasar	94 pasar	60 pasar	70 Pasar	
		8. Jumlah Prov yang akan di fasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/ identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal (PB)	-	-	32 provinsi	32 provinsi	32 provinsi	
		1. Jumlah daerah cakupan hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan (PB)	32 provinsi 50 kab tertinggal	32 provinsi 50 kab tertinggal	32 provinsi 50 kab tertinggal	32 provinsi 50 kab tertinggal	32 provinsi 50 kab tertinggal	
		2. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi (PB)	20 Posyantekdes	40 Posyantekdes	60 Posyantekdes	80 Posyantekdes	100 Posyantekdes	
		3. Jumlah daerah yang fasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan (PB):						

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		a. Jumlah Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas	-	-	17 Desa 16 Provinsi	17 Desa 16 Provinsi	20 Desa 20 Provinsi	
		b. Pengelolaan Desa Hutan	-	-	4 Desa 4 Provinsi	5 Desa 5 Provinsi	5 Desa 5 Provinsi	
		c. Pengelolaan Hutan Mangrove	-	-	1 Desa 1 Provinsi	2 Desa 2 Provinsi	2 Desa 2 Provinsi	
		4. Jumlah provinsi dan kabupaten Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui (PB):						
		a. Jumlah Cakupan Lokasi Garapan PAMSIMAS	33 Prov 32 Kab	33 Prov 32 Kab	15 Provinsi 109 kab/kota	-	-	
		b. Orientasi, koordinasi, pelatihan, bintek AMPL	-	-	32 Prov	33 Prov	33 Prov	
		5. Jumlah kabupaten yang terfasilitasi pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan (PB)	-	50 kab	60 kab	70 kab	80 kab	
		6. Jumlah Prov dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bintek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev (PB)	-	33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 8 UMK	33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 8 UMK	33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 8 UMK	33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 8 UMK	
		7. Jumlah Prov yang akan difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, dan monev (PB)	-	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	
		8. Cakupan PNPM-LMP (PB)	8 Provinsi 23 Kabupaten	27 kab di 6 prov	78 Kec di 33 Kabupaten di 10 Provinsi	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan); dan PNPM-LMP melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai standar	1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM 13 2) (PN)	32 provinsi 394 kab. 4 791 kec, termasuk 50 kab Tertinggal	4940 kec	-	-	-	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
		a. PNPM-MP Inti	-	4911 kec	5020 kec	5020 kec	5020 kec	
		b. PNPM Penguatan (termasuk didalam lokasi PNPM Inti:						
		- PNPM-MP Perbatasan	-	85 kec	85 kec	85 kec	85 kec	
		- PNPM-MP Integrasi SPP SPPN	-	-	85 Kab	91 Kab	91 Kab	
		- PNPM-MP Respek Pertanian	-	-	43 kec	43 kec	43 kec	
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional	Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab Nias dan Nias Selatan (kecamatan) (KK 13 2) (PN)	2 Kab/ 9 Kecamatan	-	-	-	-	BALAI/BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		1. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar	27 Angkt	30 Angkt	81 angkatan	117 angkatan	147 angkatan	
		2. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar	30 An gkt	36 Angkt	68 angkatan	138 angkatan	174 angkatan	
		3. Persentase pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN	Tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas pada derajad program vokasi, akademik dan profesi	1. Persentase jumlah lulusan pendidikan kader program vokasi, akademik dan profesi kepomongprajaan dengan predikat "Dengan Pujian" dan atau "Cum Laude" (PB)	4% dari jumlah praja	4% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	5% dari jumlah praja	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
		2. Persentase peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) program vokasi, akademik dan profesi kepomongprajaan (PB)	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata ≥ 2	
		3. Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik	100% (6 jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok, 6 jenis kajian pemerintahan)	100% (10 jenis penelitian mandiri dan 15 jenis penelitian kelompok, 12 jenis kajian pemerintahan)	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	
		4. Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan, 1 Kegiatan Praktek Laporan I dan Praktek Laporan II Program Vokasi	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 2 Desa Binaan, 1 Kegiatan Praktek Lapangan I, II dan III Program Vokasi	8 Desa	8 Desa	8 Desa	
		5. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan)	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan, Pengembangan sistem informasi kepegawaian).	100% (794 Pegawai)	100% (794 Pegawai)	100% (794 Pegawai)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
1. Penyelenggaraan Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan	Pelayanan administrasi akademik yang berkualitas, dokumen perencanaan, pelaksanaan pelatihan serta administrasi kerjasama	6. Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, PERENCANAAN DAN KERJASAMA
		7. Persentase Keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler	65% (2618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja	65% (4618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja	65% (4618 Praja)	65% (5919 Praja)	65% (6400 Praja)	
		1. Jumlah bahan pengajaran	17 buku literatur, bahan ajar dan GBPP/ SAP/SYLABUS Pengajaran dan 18 GBPP/SAP/ SYLABUS Pelatihan Semester I dan II program vokasi, 2 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/SYLA BUS Pengajaran Semester I dan II program akademik, 6 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/ SYLABUS program profesi	17 buku literatur, bahan ajar dan GBPP/ SAP/SYLABUS Pengajaran dan 18 GBPP/SAP/ SYLABUS Pelatihan Semester I dan II program vokasi, 2 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/SYLA BUS Pengajaran Semester I dan II program akademik, 6 buku literatur, bahan ajar GBPP/SAP/ SYLABUS program profesi	3 Jenis Bahan Ajar	3 Jenis Bahan Ajar	3 Jenis Bahan Ajar	
		2. Jumlah pedoman pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan	1. Kalender Akademik program vokasi, 1 kali Yudicium program vokasi, 2200 KHS program vokasi, 3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi, akademik dan profesi)	1. Kalender Akademik (pro-gram vokasi, akademik dan profesi), 1 kali Yudicium program vokasi, 3300 KHS program vokasi, 120 KHS program akademik, 30 KHS Program Profesi, 3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi, akademik dan profesi)	3 pedoman	4 pedoman	5 pedoman	
		3. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Fakultas	100% (2618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja	100% (4618 Praja) 100% Diksarmendispra bagi 1500 Praja	100% (4618 Praja)	100% (5919 Praja), 4 laporan	100% (6400 Praja), 4 laporan	

PROGRAM/ KEGIATAN (1)	OUTCOME/ OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		4. Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan	2 kali seminar nasional, 6 kali seminar antar jurusan 2 kali seminar antar fakultas	2 kali seminar nasional, 6 kali seminar antar jurusan 2 kali seminar dukungan seminar nasional/internasional	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
		5. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Pascasarjana	100% (85 Mahasiswa)	100% (100 Mahasiswa)	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana	100% terhadap seluruh mahasiswa pasca sarjana	
		6. Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Pascasarjana	1. Seminar Program Akademik, Pelaksanaan Seminar / Ceramah Umum Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1) Seminar Program Akademik, Pelaksanaan Penelitian Mandiri dan Penelitian Kelompok (3) Orang Dosen, 3 Kelompok)	Seminar Program Akademik, Pelaksanaan Seminar / Ceramah Umum Tenaga Pendidik dan Kependidikan (1) Seminar Program Akademik, Pelaksanaan Penelitian Mandiri dan Penelitian Kelompok (3) Orang Dosen, 3 Kelompok)	3 Jenis Seminar	3 Jenis Seminar	3 Jenis Seminar	
		7. Persentase Penggunaan Hasil Kajian dan Penelitian untuk Pengembangan Akademik	100% (6 jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok , 6 jenis kajian pemerintah). 100% (10 jenis penelitian mandiri dan 15 jenis penelitian kelompok, 12 jenis kajian pemerintahan).	100% (10 jenis penelitian mandiri dan 15 jenis penelitian kelompok, 12 jenis kajian pemerintahan).	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	100% (120 Dosen, 6 Kajian, 6 Laporan Kajian, 20 Penelitian Mandiri, 20 Penelitian Kelompok, 2 Jurnal Penelitian)	
		8. Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan, 1 Kegiatan Praktek Laporan I dan Praktek Laporan II Program Vokasi	4 kegiatan pengabdian masyarakat, 2 Desa Binaan, 1 Kegiatan Praktek Laporan I, II dan III Program Vokasi	8 Desa	8 Desa	8 Desa	
		9. Jumlah Dokumen rekomendasi senat	4 kali sidang senat	8 kali sidang senat, 1 kali kegiatan pengukuhan guru besar	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		10. Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan E-Library	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam, dan pemeliharaan Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 60.000 buku	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2420 jam dan pemeliharaan Dokumentasi dan kearsipan sejumlah 65.000 buku	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 2200 jam	
		11. Persentase ketersediaan Media Informasi secara Elektronik yang digunakan unit kerja lingkup IPDN	-	Sarana dan prasarana Laboratorium pemerintahan,	100% (2600 Praja)	100% (2600 Praja)	100% (2600 Praja)	
		12. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Lingkup IPDN	-	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	3 aplikasi yang terintegrasi	3 aplikasi yang terintegrasi	3 aplikasi yang terintegrasi	
		13. Jumlah SOP Pendidikan	Jumlah NSPM (Pengajaran, Pelatihan Perencanaan, Keuangan, Kemahasiswaan dan Fakultas)	Jumlah NSPM (Pengajaran, Pelatihan Perencanaan, Keuangan, Kemahasiswaan dan Fakultas)	100% (5 naskah)	100% (5 naskah)	100% (5 naskah)	
		14. Jumlah Jurnal Pendidikan yang terakreditasi	6 jurnal jurusan pada program vokasi . 1 jurnal program akademik (Pascasarjana). 1 Jurnal Penelitian/pengabdian masyarakat, 1 Majalah Institut	6 jurnal jurusan pada program vokasi . 1 jurnal program akademik (Pascasarjana). 1 Jurnal Penelitian/pengabdian masyarakat, 1 Majalah Institut	2 Jurnal	2 Jurnal	2 Jurnal	
		15. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan	100% (2618 Praja)	100% (4618 Praja)	100% (4618 Praja)	100% (5919 Praja)	100% (6400 Praja)	
		16. Cakupan Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan Praja	3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi, akademik dan profesi- Pelatihan)	3 kegiatan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (vokasi, akademik dan profesi- Pelatihan).	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan	18 GBPP/SAP, 17 Modul, 3 Praktek Lapangan, 1 Pedoman Pelatihan	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas	17. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah	3 Penjasama dan 2 MOU Kerjasama.	3 Penjasama dan 2 MOU Kerjasama	19 MOU	19 MOU	19 MOU	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
		18. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
		19. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	100% (2 Naskah RKT dan PI)	100% (2 Naskah RKT dan PI)	100% (2 Naskah RKT dan PI)	100% (2 Naskah RKT dan PI)	100% (2 Naskah RKT dan PI)	
		20. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN	3 kali koordinasi, Monitoring evaluasi ke Kampus IPDN Daerah	5 kali koordinasi, Monitoring evaluasi ke Kampus IPDN Daerah	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	
		1. Persentase penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langgaran Daya dan Jasa)	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas	2. Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI Lingkup IPDN)	6 Jenis Dokumen,	6 Jenis Dokumen,	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
		3. Persentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Tindak lanjut LHP tepat Waktu	100% (1 Laporan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan TLHP), Penatausahaan	100% (1 Laporan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan TLHP), Penatausahaan	100% (1 Laporan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)	100% (1 Laporan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)	100% (1 Laporan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran dan TLHP)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
			Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan dan Evaluasi dan Hasil Pemeriksaan	Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan dan Evaluasi dan Hasil Pemeriksaan				
		4. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian bagi tenaga Kependidikan	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan)	100% (Sertifikasi bagi 80 dosen, PAK 120 Dosen, 225 pegawai terlayani kenaikan pangkat dan jabatan, Pengembangan sistem informasi kepegawaian).	100% (794 Pegawai)	100% (794 Pegawai)	100% (794 Pegawai)	
		5. Persentase Kesesuaian Perencanaan Diklat dengan Kebutuhan Tenaga Kependidikan	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)	100% (Keg. Pembinaan dan Diklat Tenaga Kependidikan, Bantuan izin belajar bagi 30 org tenaga kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	100% (60 Tenaga Kependidikan)	
		6. Persentase Pemahaman aparatur mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)	100% (2 Laporan, 794 Profil Pegawai, 1 Sistem)	
		7. Persentase Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Lingkup IPDN	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Tingkat Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Lingkup IPDN	100% (14 Laporan, 2618 Praja Pesiar Terpinpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)	100% (14 Laporan, 4618 Praja Pesiar Terpinpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)	100% (14 Laporan, 4618 Praja Pesiar Terpinpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)	100% (14 Laporan, 5919 Praja Pesiar Terpinpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)	100% (14 Laporan, 6400 Praja Pesiar Terpinpin, 5 Ha Lahan Pelatihan)	
		9. Persentase Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Kerja Lingkup IPDN	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	
		10. Persentase Tingkat Pelayanan Menza dan Laundry Praja	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	

PROGRAM/ KEGIATAN (1)	OUTCOME/ OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
3. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan		11. Persentase Tingkat Pelayanan Kesehatan Praja IPDN	100% (2618 Praja, 250 Pegawai)	100% (4618 Praja, 250 Pegawai)	100% (4618 Praja, 250 Pegawai)	100% (5919 Praja, 250 Pegawai)	100% (6400 Praja, 250 Pegawai)	BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN KEMAHASISWAAN
		12. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan Lingkup IPDN sesuai kebutuhan	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	100% (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	
		13. Persentase Acara Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Terhadap pelayanan pimpinan	4 kali kegiatan Humas, 4 kali kegiatan protokol	4 kali kegiatan Humas, 4 kali kegiatan protokol	100% (4 kali Konferensi Pers, 12 Laporan)	100% (4 kali Konferensi Pers, 12 Laporan)	100% (4 kali Konferensi Pers, 12 Laporan)	
		1. Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Administrasi Praja/Mahasiswa	100% (2618 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)	100% (4618 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)	100% (4618 Praja)	100% (5919 Praja)	100% (6400 Praja)	
		2. Persentase Database Alumni IPDN	60% kelengkapan data alumni	70% kelengkapan data alumni	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)	100% (4 Provinsi, 1 Buku, 2 Seminar)	
		3. Persentase Rekomendasi Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Praja	100% (1 Kegiatan Bantuan Hukum)	100% (1 Kegiatan Bantuan Hukum)	100% (4618 Praja)	100% (5919 Praja)	100% (6400 Praja)	
		4. Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja	100% (2618 Praja, 125 Pengasuh)	100% (4618 Praja, 125 Pengasuh)	100% (4618 Praja, 125 Pengasuh)	100% (5919 Praja, 125 Pengasuh)	100% (6400 Praja, 125 Pengasuh)	
		5. Persentase penanganan Pelanggaran ringan Kehidupan Praja	5% (2618 Praja)	5% (4618 Praja)	5% (4618 Praja)	5% (5919 Praja)	5% (6400 Praja)	
		6. Persentase Pelayanan Bimbingan dan Konseling Praja	100% (2618 Praja, 1 keg. Ibu Asuh)	100% (4618 Praja, 1 keg. Ibu Asuh)	100% (4.350 Praja)	100% (4.350 Praja)	100% (4.350 Praja)	
		7. Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler	65% (2618 Praja) 100% Diksarnendispra bagi 1500 Praja	65% (4618 Praja) 100% diksarnendispra bagi 1500 Praja	65% (4618 Praja)	65% (5919 Praja)	65% (6400 Praja)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
4. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah	Terselenggaranya pendidikan kepamongprajaan Kampus IPDN di Daerah (Kampus Bukittinggi, Kampus Pekanbaru, Kampus Makassar, Kampus Manado, Kampus Mataram, Kampus Pontianak, dan Kampus Papua)	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa)	100%	100%	100%	100%	100%	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DAERAH
		2. Jumlah Dokumen Anggaran Tahunan dan Laporan Pengelolaan Keuangan/Kinerja Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI Lingkup IPDN Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	42 Jenis Dokumen	42 Jenis Dokumen	42 Jenis Dokumen	
		3. Persentase Penyelesaian Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Tindaklanjut LHP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Persentase Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Perlengkapan	100%	100%	100% (140 Pegawai IPDN Kampus di Daerah)	100% (140 Pegawai pada 7 IPDN Kampus di Daerah)	100% (140 Pegawai pada 7 IPDN Kampus di Daerah)	
		5. Jumlah Unit Sarana Penunjang Pendidikan Lingkup IPDN Daerah	32 unit	40 unit	40 unit	70 unit	70 unit	
		6. Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Program Studi	100%	100%	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	
		7. Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 kali seminar nasional, 2 kali seminar jurusan	4 kali seminar nasional, 4 kali seminar jurusan, 4 kali dukungan seminar nasional	14 kali Seminar	14 kali Seminar	14 kali Seminar	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
8.		Persentase Penggunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Akademik	100% (2 jenis penelitian mandiri dan 3 jenis penelitian kelompok, 2 jenis kajian program jenis kajian program studi)	100% (3 jenis penelitian mandiri dan 6 jenis penelitian kelompok, 2 jenis kajian program studi)	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)	100% (21 Dosen, 14 Kelompok Dosen)	
9.		Cakupan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	1 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan.	1 kegiatan pengabdian masyarakat, 1 Desa Binaan.	24 Dokumen, 7 Desa Binaan	24 Dokumen, 7 Desa Binaan	24 Dokumen, 7 Desa Binaan	
10.		Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 1600 jam dan pemeliharaan dokumentasi dan kearsipan sejumlah 15.000 buku	Terpenuhi Kegiatan Pelayanan Perpustakaan selama 1600 jam dan pemeliharaan dokumentasi dan kearsipan sejumlah 15.000 buku	Pelayanan selama 2640 jam	Pelayanan selama 2640 jam	Pelayanan selama 2640 jam	
11.		Persentase Pelayanan Administrasi dan Operasional Pelatihan	100% (200Praja)	100% (500 Praja)	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	
12.		Cakupan Pengembangan Dan Evaluasi Pelatihan Praja	1 Keg Praktek Lapangan I, II, III, Magang, dan BKP Program Vokasi	1 Keg Praktek Lapangan I, II, III, Magang, dan BKP Program Vokasi	14 Praktek Lapangan	14 Praktek Lapangan	14 Praktek Lapangan	
13.		Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah	-	8 Penjasama dan 4 MOU Kerjasama	14 MOU	14 MOU	14 MOU	
14.		Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	20 dokumen perencanaan terselesaikan	30 dokumen perencanaan terselesaikan	21 Dok	21 Dok	21 Dok	
15.		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup IPDN Kampus di Daerah	12 kali Koordinasi, Monitoring evaluasi	15 kali koordinasi, Monitoring evaluasi	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	
16.		Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Administrasi Keprajaan Lingkup IPDN Daerah	100% (200 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)	100% (500 praja terlayani dalam pemberkasan kepegawaian)	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	100% (2800 Praja)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		17. Persentase Pelayanan Administrasi, Bimbingan dan Pengawasan Praja	100% (200 praja kegiatan Pengasuhan)	100% (500 praja kegiatan Pengasuhan)	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)	100% (2800 Praja, 70 Pengasuh)	
		18. Persentase keikutsertaan Praja pada Kegiatan Ekstrakurikuler	100% (200 Praja)	100% (500 Praja)	100% (1600 Praja)	100% (1600 Praja)	100% (1800 Praja)	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri (PB)	80%	80%	80%	90%	90%	INSPEKTORAT JENDERAL
		2. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi (PB)	80%	80%	80%	90%	90%	
		3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan provinsi serta kabupaten/kota tertentu	80%	80%	80%	80%	80%	
		4. Jumlah reviu Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP (KK.19.1)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri	10 besar	10 besar	5 besar	5 besar	5 besar	
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Inspektorat Jenderal	1. Persentase penyelesaian pelayanan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT ITJEN

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		2. Persentase penyelesaian Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		3. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	80 %	80 %	80 %	90 %	90 %	
		5. Persentase jumlah dokumen laporan analisis hasil pengawasan.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
		6. Persentase penyelesaian dokumen monitoring, laporan keuangan dan aset dan pelaporan kinerja	80 %	80 %	80 %	90 %	90 %	
		7. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		8. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan.	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	
		9. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pengawasan	3 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	
		10. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Inspektorat Jenderal	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
		11. Jumlah Laporan Manual Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat pada daerah binaan terpilih	-	-	10 Laporan pilot project	10 Laporan pilot project	10 Laporan pilot project	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I.	1. Persentase tingkat ketepatan aparaturnya melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi: Ditjen Ottda, Badan Diklat, IPDN dan BNPP.	80%	80%	80%	90%	90%	INSPEKTORAT WILAYAH I
		2. Persentase tingkat ketepatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi: Banten, DI. Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.	80%	80%	80%	90%	90%	
		3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	2 Laporan (Bengkulu & Kalteng)	3 Laporan (DIY, Sulbar & Papbar)	2 Laporan (Banten & Babel)	1 Laporan (Sulsel)	-	
		4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri di provinsi: Banten, DI. Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	
		5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Ottda, Badan Diklat, IPDN dan BNPP.	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Fungsional Wilayah II	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah II.	1. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi: Setjen, Ditjen PMD, Itjen.	80%	80%	80%	90%	90%	INSPEKTORAT WILAYAH II
		2. Persentase tingkat ketaatan aparaturnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi: Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku.	80%	80%	80%	90%	90%	
		3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.	1 Laporan (Sulut)	-	-	6 Laporan (Riau, Lampung, Kalbar, Bali, NTT & Maluku)	1 Laporan (Jatim)	
		4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri di provinsi : Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku.	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	
		5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Setjen, Ditjen PMD, Itjen.	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
		6. Jumlah revidu Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP (KK.19.1)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah III.	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi: Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda.	80%	80%	80%	90%	90%	INSPEKTORAT WILAYAH III
		2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi: Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.	80%	80%	80%	90%	90%	
		3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.	2 Laporan (Kepri & Jambi)	1 Laporan (Sulteng)	1 Laporan (NAD)	4 Laporan (Sumut, Jabar, Kaltim & Malut)	-	
		4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri di provinsi : Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	
		5. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda.	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah IV.	1. Persentase tingkat ketaatan aparatur melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi: Ditjen Bina Bangda, Ditjen PUM, dan Badan Litbang.	80%	80%	80%	90%	90%	INSPEKTORAT WILAYAH IV
		2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi : Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.	80%	80%	80%	90%	90%	
		3. Jumlah laporan hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.	2 Laporan (Sumbar & Kalsel)	1 Laporan (Papua)	2 Laporan (DKI & Gorontalo)	4 Laporan (Sumsel, Jateng, NTB & Sultra)	-	
		4. Jumlah laporan hasil pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kemendagri di provinsi : Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.		Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP di unit kerja Ditjen Bina Bangsa, Ditjen PUM, dan Badan Litbang.	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
6. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah.	Persentase penanganan kasus dan khusus serta pengaduan masyarakat pada 12 unit kerja Kemendagri dan 33 provinsi serta kabupaten/kota tertentu.	80 % Laporan dari jumlah kasus yang ditangani.	80 % Laporan dari jumlah kasus yang ditangani.	80 % Laporan dari jumlah kasus yang ditangani.	80 % Laporan dari jumlah kasus yang ditangani.	80 % Laporan dari jumlah kasus yang ditangani.	INSPEKTORAT KHUSUS

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (KK-18.1)	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	1 Permendagri Renja	SEKRETARIAT JENDERAL
			1 Permendagri Renstra	-	-	-	1 draft Permendagri Renstra Tahun 2015-2019	
			1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	1 Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan	
			2 Permendagri DAK lingkup Kementerian	2 Permendagri DAK lingkup Kementerian	1 Permendagri DAK lingkup Kementerian	1 Permendagri DAK lingkup Kementerian	1 Permendagri DAK lingkup Kementerian	
			2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA)	
		2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi (KK-18.2)	5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	7 laporan	
		3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kemendagri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya (KK-18.3)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kemendagri dengan penguasan RPJMN 2010-2014 (KK-18.4)	70%	75%	80%	85%	90%	
		5. Persentase pemahaman aparaturnya mengenai kebijakan, Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
1. Perencanaan Program dan Anggaran	Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta hasil monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian Dalam Negeri	6. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999. (KK 4.1)	1 Dokumen					
		7. Persentase Pemutakhiran Database PNSP di lingkungan Kemendagri	75% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	80% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	85% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	87% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	90% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	
					50% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	75% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	90% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	
		8. Jumlah Perda yang dikaji (KK-9.1)	3.000 Perda	9.000 Perda	3.000 Perda	2.500 Perda	2.500 Perda	
		9. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdal (KK-9.2)	45 Prolegdal	50 Prolegdal	64 Rancangan Perundang-undangan	60 Rancangan Perundang-undangan	57 Rancangan Perundang-undangan	
		10. Laporan keuangan Kemendagri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KK 19.5)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		1. Jumlah regulasi terkait bidang perencanaan lingkup Kemendagri	3 Permendagri	4 Permendagri	3 Permendagri	3 Permendagri	4 Permendagri	
		2. Jumlah dokumen perencanaan anggaran pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kemendagri (RKA-KL dan DIPA)	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)	2 Dokumen anggaran (RKA-KL & DIPA)	
		3. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN (KK.19.3)	-	-	100%	100%	100%	
		4. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran lintas sektor	1 Dokumen	-	-	-	-	
								BIRO PERENCANAAN

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		5. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	
		6. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian dalam Negeri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya (KK 18.3)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		7. Persentase konsistensi capaian Kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014 (KK 18.4)	70%	75%	80%	85%	90%	
		8. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan lingkup Sekretariat Jenderal	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
		9. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahunan Setjen	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	6 laporan	
		10. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan lingkup Sekretariat Jenderal	-	75%	80%	85%	90%	
		11. Persentase penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan DKTP-UB lingkup Kementerian yang tepat waktu	70%	80%	85%	90%	95%	
		12. Persentase penyelesaian administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan	80%	85%	90%	95%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawain	Meningkatnya kualitas pengadaaan pegawai sesuai dengan perencanaan kebutuhan organisasi, database PNSP, pengembangan karir, kebutuhan diklat pegawai, dan pelayanan mutasi serta disiplin dan kesra pegawai Kementerian Dalam Negeri	1. Persentase Pengadaan PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	BIRO KEPEGAWAIAN
		2. Persentase Pemutakhiran Database PNSP di lingkungan Kemendagri	75% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	80% database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	85 % database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	87 % database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	90 % database PNSP Kemendagri dimutakhirkan	
			-	-	50% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	75% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	90% database PNSP Kemendagri berbasis kompetensi dan kualifikasi SDM	
		3. Persentase kesesuaian perencanaan Diklat dengan kebutuhan Calon peserta dan pemanfaatan Alumni Diklat PNSP Kemendagri dengan kebutuhan organisasi	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (330 orang)	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (200 orang)	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)	100% perencanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan Calon peserta Diklat (75 orang)	
			-	-	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)	100% pemanfaatan alumni Diklat PNSP Kemendagri sesuai dgn organisasi (75 orang)	
		4. Persentase pelayanan penyelesaian administrasi kepegawain PNSP Kemendagri dan Praja IPDN secara tepat waktu	100% (1400 orang)	100% (1675 orang)	100% (1950 orang)	100% (2235 orang)	100% (2515 orang)	
		5. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan Struktural dan Fungsional bagi PNSP di lingkungan Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		6. Persentase Penyelesaian Hukuman Disiplin dan Kesra, Administrasi Tanda Kehormatan dan Penghargaan, penyelesaian LHKPN dan penyelesaian LP2P	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999 (KK-4.1)	1 Dokumen	-	-	-	-	
		8. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah (KK-4.2)	-	100%	-	-	-	
		9. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS (KK-4.3)	-	-	100% (1 laporan)	-	-	
		10. Penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (KK 8.2)	100%	-	-	-	-	
		11. Tersusunnya RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD (KK 8.3)	1 Dokumen RPP	-	-	-	-	
		12. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS kemendagri (KK.8.1)	50%	100%	-	-	-	
		13. Jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian	-	-	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010	2011	2012	2013	2014	
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		14. Persentase penilaian dan pengamatan calon Sekda Prov/Kab/Kota yang terekomendasi	-	100%	100%	100%	100%	
		15. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Kepegawalan	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah daerah, tersedianya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat undang-undang sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.	1. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi	3 pedoman	3 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	1 pedoman	BIRO ORGANISASI
		2. Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	-	-	-	1 paket	
		3. Jumlah PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan	-	-	1 PP	-	-	
		4. Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota	-	-	-	60 %	100 %	
		5. Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007	-	-	-	1 Laporan	1 laporan	
		6. Jumlah fasilitasi teknis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja.	8 (delapan) fasilitasi	7 (tujuh) fasilitasi	-	-	-	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		7. Jumlah Evaluasi Teknis Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Pelaporan Kinerja.	4 (empat) laporan money	4 (empat) laporan money	-	-	-	
		8. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas Fungsi Lingkup Kemendagri yang di sahkan dan jumlah daerah yang difasilitasi	-	-	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun	200 SOP lingkup Kemendagri yang telah selesai disusun	
		9. Persentase Kemendagri, Provinsi (33 Prov.) dan Kab/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Anjab (Analisa Jabatan Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Ejab), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ))	-	-	33 Provinsi dan 264 Kab/ Kota yang difasilitasi mampu menyusun SOP	33 Provinsi dan 264 Kab/ Kota yang difasilitasi mampu menyusun SOP	33 Provinsi dan 264 Kab/ Kota yang difasilitasi mampu menyusun SOP	
		10. Jumlah penerapan akuntabilitas kinerja yang efektif dalam rangka mendorong tercapainya kinerja yang terukur	-	-	100% (12 komponen)	100% (12 komponen)	100% (12 komponen)	
		11. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Organisasi.	100%	100%	100% (12 komponen)	100% (12 komponen)	100% (12 komponen)	
		1. Jumlah Perda yang di kaji (KK-9.1) (PN)	3.000 Perda	9.000 Perda	3.000 Perda	2.500 Perda	2.500 Perda	BIRO HUKUM
4. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya keselarasan arah dalam implementasi pembangunan yang diwujudkan melalui							

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
5. Pengelolaan, Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan	harmonisasi peraturan-perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyajian produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri	2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri (KK-9.2)	45 Prolegdagri	50 Prolegdagri	64 Rancangan Perundang-undangan	60 Rancangan Perundang-undangan	57 Rancangan Perundang-undangan
		3. Jumlah rancangan peraturan daerah bidang pajak dan Retribusi dan perda lainnya yang dievaluasi	200 Raperda	200 Raperda	200 Raperda	200 Raperda	200 Raperda
		4. Persentase surat Mendagri kepada Kepala Daerah untuk menyesuaikan produk hukum daerah yang bermasalah	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase hasil Klarifikasi terhadap rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi yang telah dievaluasi	100% ditindaklanjuti daerah	100% ditindaklanjuti daerah	100% ditindaklanjuti daerah	100% ditindaklanjuti daerah	100% ditindaklanjuti daerah
		6. Persentase penyelesaian sengketa hukum disidang pengadilan dan bantuan hukum	100% terselesaikan	100% terselesaikan	100% terselesaikan	100% terselesaikan	100% terselesaikan
		7. Jumlah dokumentasi hukum lingkup Kemendagri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		8. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian operasional Ketatausahaan, pimpinan lingkup Setjen dan Kementerian	90%	90%	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan	Meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan serta terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.	2. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian operasional kerumahtanggaan dan perlengkapan lingkup Setjen	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
6. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi	3. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu	-	-	95%	95%	95%	PUSAT DATA, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI
		4. Tingkat Keamanan Lingkungan Kantor dan Lingkungan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Persentase Acara Pimpinan Kementerian yang sesuai dengan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Persentase penyelenggaraan koordinasi jajaran pemerintahan daerah seluruh Indonesia sesuai kebutuhan	-	-	100% berupa 6 laporan kegiatan	100% berupa 6 laporan kegiatan	100% berupa 6 laporan kegiatan	
		7. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%	100%	
		1. Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan komponen/unit kerja di lingkungan Kemendagri	50% tersedianya data dan informasi eksekutif	55% tersedianya data dan informasi eksekutif	65% tersedianya data dan informasi eksekutif	70% tersedianya data dan informasi eksekutif	80% tersedianya data dan informasi eksekutif	
		2. Persentase tingkat ketersediaan media informasi secara elektronik	65% tersedia media elektronik	70% tersedia media elektronik	75% tersedia media elektronik	85% tersedia media elektronik	90% tersedia media elektronik	
		3. Persentase tingkat ketersediaan jaringan komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	50% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri	60% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri	65% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri	75% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri	80% tersedia jaringan komunikasi di lingkungan Kemendagri	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
7. Pengelolaan Penerangan	Terselenggaranya komunikasi publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan.	4. Frekuensi pengiriman/penerimaan berita /informasi yang dicekualikan	5 berita per bulan untuk berita yang dicekualikan	10 berita per bulan untuk berita yang dicekualikan	15 berita per bulan untuk berita yang dicekualikan	20 berita per bulan untuk berita yang dicekualikan	25 berita per bulan untuk berita yang dicekualikan	PUSAT PENERANGAN
		5. Jumlah pengembangan sistem informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri	2 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri	3 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri	4 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri	4 aplikasi yang terintegrasi Sistem Informasi di lingkungan Kemendagri	
		6. Persentase tingkat penggunaan <i>software legal</i> atau <i>open source</i> di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	-	50 %	70 %	85 %	100 %	
		7. Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyelenggaraan e-Gov	-	4 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik	5 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik	6 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik	7 daerah terbina dalam penyelenggaraan e-Gov yang baik	
		8. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusdatinkomtel	100%	100%	100%	100%	100%	
		1. Persentase fasilitasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi	80%	80%	80%	85%	95%	
		2. Jumlah pengadaan dan frekuensi pemeliharaan sarana prasarana pendukung pengelolaan kehumasan (media centre)	1 paket sarana dan prasarana kehumasan serta pemeliharaan	1 paket sarana dan prasarana kehumasan serta pemeliharaan	-	-	-	
		3. Jumlah Persentase fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)	90 % fasilitasi hubungan antar lembaga dan pers (2 laporan)	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		4. Jumlah dokumen berita aktual dan elektronik isu-isu aktual, kegiatan dan kebijakan strategis Kemendagri	• 2 dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet) • 1 dokumen setiap hari sabtu (berita aktual).	• 2 dokumen setiap hari kerja (berita aktual dan berita internet) • 1 dokumen setiap hari sabtu (berita aktual).	-	-	-	-
		5. Jumlah talkshow/variety show/majalah/iklan layanan masyarakat/jurnal/brosur/banner/leaflet/Booklet/running teks	• 1 paket talkshow 16 kegiatan (tayang di 10 tv dan 6 radio) • 2 edisi majalah • media praja Kemendagri	• 1 paket talkshow 16 kegiatan (tayang di 10 tv dan 6 radio) • 2 edisi majalah • media praja Kemendagri	-	-	-	-
		6. Himpunan kebijakan yang diterbitkan.	• 1 paket himpunan kebijakan Kemendagri	• 1 paket himpunan kebijakan Kemendagri.	-	-	-	-
		7. Persentase pengelolaan fasilitas penangguhan	100%	100% (4 laporan)	100% (4 laporan)	100% (4 laporan)	100% (4 laporan)	-
		8. Frekuensi pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan penanganan pengaduan.	1 paket bintek pustakawan Kemendagri	1 paket bintek pustakawan Kemendagri	-	-	-	-
			7 (tujuh) kali bintek, bidang: fotografi, kamera audiovisual, jurnalisme, manajemen komunikasi, media online dan perpustakaan	7 (tujuh) kali bintek, bidang: fotografi, kamera audiovisual, jurnalisme, manajemen komunikasi, media online dan perpustakaan	-	-	-	-
		9. Revitalisasi fungsi dan peran Puspen Depdagri dalam konteks UU Keterbukaan Informasi	-	• 1 kali lokakarya	-	-	-	-
			-	• 1 dokumen panduan kerja	-	-	-	-

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		Publik (pembentukan tim kerja, lokakarya, penyusunan panduan kerja, reorientasi kerja, outsourcing, dan sarana prasarana).		1 forum reorientasi kerja 2 orang tenaga outsourcing 1 paket pengadaan komputer dan printer.	-	-	-	
		10. Persentase Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan e-library Kementerian Dalam Negeri	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	100% (2 Laporan)	
		11. Sosialisasi Permendagri tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, penyusunan instrumen fasilitasi dan instrumen supervisi penanganan pengaduan masyarakat, bintek penanganan pengaduan masyarakat.	-	1 kali kegiatan sosialisasi Permendagri	-	-	-	
			-	1 kegiatan Rakor	-	-	-	
			-	2 dokumen (dokumen instrumen fasilitasi dan dokumen instrumen supervisi)	-	-	-	
			-	2 paket kegiatan (fasilitasi dan supervisi) 1 kegiatan Bintek.	-	-	-	
		12. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan.	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Pengkajian Kebijakan Strategik	Terpenuhinya kebutuhan rumusan strategik Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi	1. Persentase isu strategis yang dianalisis dan direkomendasi menjadi materi kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIK
		2. Persentase hasil analisis kebijakan dan program strategik yang dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Persentase materi laporan hasil supervisi dan evaluasi yang diteliti dalam pelaksanaannya, pengendalian dan tindak lanjut pelaksanaan kebijakan strategik lingkup Kementerian Dalam Negeri	65%	65%	65%	70%	75%	
		4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Kajian Kebijakan Strategik	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Tersedianya dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri	1 Dokumen Blueprint Reformasi Birokrasi	3 Pedoman	-	-	-	
		6. Persentase pemahaman aparaturnya mengenai kebijakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	100% tersusunnya 6 (enam) dokumen kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	
		7. Persentase perubahan pola pikir dan budaya kerja aparaturnya Kemendagri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang	10%	15%	20%	30%	50%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
9. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	Tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.	berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan daerah						
		1. Persentase dokumen regulasi/ pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi kerjasama Luar Negeri yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI
		2. Persentase penyelesaian laporan per semester pengelolaan sistem informasi kerjasama luar negeri yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Persentase distribusi buku informasi rencana beasiswa dan training luar negeri ke Daerah	75%	75%	-	-	-	
		4. Jumlah Provinsi yang dimonitor dalam rangka pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, Penugasan expert/tenaga ahli dan beasiswa/training ke luar negeri	33 Provinsi	33 Provinsi	-	-	-	
		5. Jumlah pengakses informasi dari sistem informasi kerjasama Luar negeri	10.000 org	15.000 org	-	-	-	
		6. Persentase rekomendasi perjalanan dinas luar negeri, rekomendasi expert dan pengajuan calon penerima beasiswa/training ke luar negeri sesuai dengan SOP dan terselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
10. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri	7. Jumlah dokumen kerjasama luar negeri yang diproses dan dihasilkan	50 dokumen	60 dokumen	65 dokumen	70 dokumen	75 dokumen	PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET
		8. Persentase fasilitasi pelaksanaan administrasi teknik/sister/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/ Organisasi Internasional (OI)/ Lembaga Asing Non Pemerintah (LANP)	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Persentase monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat AKLN	100%	100%	100%	100%	100%	
		1. Jumlah dokumen/Peraturan Perundangan tentang pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kemendagri	1 dokumen pedoman akuntansi keuangan dan aset	2 dokumen pedoman akuntansi keuangan dan aset	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang	3 surat keputusan menteri mengenai pedoman penatusahaan BMN, penghapusan BMN dan Pengadaan barang	
		2. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KK 19.5)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
		3. Jumlah hasil laporan akuntansi pengelola keuangan dan aset lingkungan setjen dan Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	Tersedianya 4 laporan akuntansi pengelola keuangan dan 3 laporan aset Kementerian yang akuntabel dan sesuai jadwal	
		4. Persentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup setjen yang akuntabel dan tepat waktu	45%	55%	100%	100%	100%	
		5. Persentase hasil LHP lingkup setjen dan Kementerian yang ditindaklanjuti.	55%	65%	100%	100%	100%	
		6. Jumlah bendaharawan lingkup Sekretariat dan Kementerian yang memenuhi persyaratan	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang	
		7. Persentase Satker yg menyelenggarakan SIMAK BMN (KK.19.2)	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Satker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan (KK.19.4)	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Persentase pengelola SAI dan SIMAK BMN yang mengikuti Diklat (KK.19.5)	100%	100%	-	-	-	
		10. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		11. Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terfaksananya pengelolaannya sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri	1. Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah	25% (4 Daerah)	50% (4 Daerah) dan 15% (3 daerah)	100% (4 Daerah) dan 65% (3 daerah)	100% (3 daerah)		SEKRETARIAT JENDERAL
1. Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedisnasan IPDN di 4 (empat) daerah (Sumbang, Riau, Sulsel, dan Sultut)	25%	95%	100%			PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET
		2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedisnasan IPDN di 3 (tiga) daerah (Kalbar, NTB, dan Papua)	-	15%	65%	100%		
		3. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	1. Persentase penyelesaian dokumen program dan anggaran	100%	100%	100%	100%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA- NGAN
		2. Persentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	75%	100%	100%	100%	
		3. Persentase penyelesaian pedoman, Juknis dan peraturan perundang-undangan kelitbang lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan	70%	75%	80%	90%	
		4. Persentase pemanfaatan data-base Litbang dan perpustakaan	55%	65%	75%	85%	
		5. Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (Jurnal ilmiah dan media litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	75%	75%	75%	80%	
		6. Persentase penyelesaian pelayanan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	
							SEKRETARIAT BPP

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
		7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawalan tugas teknis lainnya	75%	75%	80%	90%	95%
		8. Persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur litbang	80%	80%	80%	90%	100%
		9. Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan Penelitian dan Pengembangan	-	100%	100%	100%	100%
		10. Persentase penyelesaian dan penataan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN	-	80%	85%	90%	100%
		11. Persentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP	75%	75%	80%	90%	100%
		12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi kelitbang	-	33 provinsi/ 54 kab/kota 3 regional	33 provinsi/ 54 kab/kota 3 regional	33 provinsi/ 54 kab/kota 3 regional	33 provinsi/ 54 kab/kota 3 regional
		13. Persentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		14. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)	100%	100%	100%	100%	100%
		15. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan)	-	100%	100%	100%	100%
		16. Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan penda	-	50%	50%	75%	100%

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)	
			2010	2011	2012	2013		
			(4)	(5)	(6)	(7)		
			2014					
		17. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah yang berkualitas	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	10 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	20 hasil penelitian/kajian	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN OTONOMI DAERAH
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	4 hasil FGD	5 hasil FGD	7 hasil FGD	10 hasil FGD	
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kaitannya dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah	-	100%	100%	100%	100%	
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta fasilitasi kaitannya bidang PUM dan Kependudukan yang berkualitas	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	10 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	20 hasil penelitian/kajian	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	4 hasil FGD	5 hasil FGD	7 hasil FGD	10 hasil FGD	
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kaitannya dengan rencana kerja bidang pemerintahan umum dan kependudukan	-	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTCOME/OUTPUT (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi keltbangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	10 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	20 hasil penelitian/kajian	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	4 hasil FGD	5 hasil FGD	7 hasil FGD	10 hasil FGD	
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi keltbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang pembangunan dan keuangan daerah yang berkualitas	1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	10 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	15 hasil penelitian/kajian	20 hasil penelitian/kajian	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
		2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang pembangunan dan keuangan daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti	-	4 hasil FGD	5 hasil FGD	7 hasil FGD	10 hasil FGD	
		3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi keltbangan dengan rencana kerja bidang pembangunan dan keuangan daerah	-	100%	100%	100%	100%	

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	(2) Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	(3) 1. Jumlah alumni diklat	(4) 11.000 alumni	(5) 12.000 alumni	(6) 13.000 alumni	(7) 14.000 alumni	(5) 15.000 alumni	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		2. Persentase meningkatnya jumlah peserta sesuai dengan persyaratan diklat	-	70%	75%	80%	85%	
		3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda yang disusun. (KK.8.8)	40 NSPK	90 NSPK	130 NSPK	165 NSPK	190 NSPK (k)	
		4. Jumlah naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi (KK.8.4)	10 Naskah	22 Naskah	34 Naskah	44 Naskah	50 Naskah (k)	
		5. Jumlah modul kediklatan yang terstandar	94 Modul	154 Modul	226 Modul	298 Modul	358 Modul (k)	
		6. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan	60%	70%	80%	85%	90%	
		7. Jumlah tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi (KK.8.6)	100 orang	200 orang	275 orang	350 orang	400 orang (k)	
		8. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga Diklat (KK.8.7)	22 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	
		9. Jumlah lembaga Diklat yang ditetapkan kapasitasnya (KK.8.5)	5 Lembaga Diklat	10 Lembaga Diklat	28 Lembaga Diklat	38 Lembaga Diklat	-	
		10. Jumlah lembaga diklat yang efektif (KK.8.9)	-	5 Lembaga Diklat	10 Lembaga Diklat	28 Lembaga Diklat	38 Lembaga Diklat	
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.	1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT BADAN DIKLAT
		2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (5)	
2. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan manajemen dan pemerintahan daerah bagi aparat kemendagri dan pemerintahan daerah	3. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
		4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan dukungan teknis Badan Diklat	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan	60%	70%	80%	85%	90%	
		6. Jumlah lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya (KK 8.5)	5 lembaga Diklat	10 lembaga Diklat	28 lembaga Diklat	38 lembaga Diklat	-	
		7. Jumlah lembaga Diklat yang efektif (KK 8.9)	-	5 lembaga Diklat	10 lembaga Diklat	28 lembaga Diklat	38 lembaga Diklat	
		8. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	75%	75%	80%	85%	85%	
		1. Jumlah angkatan diklat calon camat (PB)	-	-	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	
		2. Jumlah angkatan Diklat camat (PB)	5 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	
		3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda. (KK 8.8)	9 NSPK	13 NSPK	9 NSPK	7 NSPK	6 NSPK	
		4. Jumlah modul Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda	25 Modul	15 Modul	18 Modul	18 Modul	15 Modul	
		5. Jumlah angkatan Diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan dan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan Standar Pelayanan Minimal (PB)	25 angkatan	19 angkatan	22 angkatan	25 angkatan	28 angkatan	
		6. Jumlah angkatan Diklat manajemen dan kepemimpinan Pemda Bidang Kader dan Kepemimpinan	6 angkatan	7 angkatan	8 angkatan	8 angkatan	8 angkatan	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (5)	
3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kebidiklatan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah bagi aparat Kemendagri dan Pemda	7. Jumlah angkatan, Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (PB)	1 angkatan	6 angkatan	2 angkatan	6 angkatan	1 angkatan	PUSAT DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN DAN KEUANGAN DAERAH
		8. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat Manajemen & Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	-	70%	75%	80%	85%	
		9. Jumlah calon praja IPDN, hasil seleksi pusat dan rintisan gelar pendidikan	1500 orang	1500 orang	1500 orang	1500 orang	1500 orang	
		10. Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil pemilu 2014 (PB)	-	-	-	-	3000 orang	
		11. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi (KK 8.4)	-	-	3 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	
		1. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah, (KK 8.8)	9 NSPK	11 NSPK	9 NSPK	7 NSPK	5 NSPK	
		2. Jumlah modul Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	25 modul	15 modul	18 modul	18 modul	15 modul	
		3. Jumlah angkatan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	23 angkatan	54 angkatan	54 angkatan	54 angkatan	54 angkatan	
		4. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan daerah	-	70%	75%	80%	85%	
		5. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi	-	-	3 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (5)	
4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Struktural dan Teknis bagi aparat Kemendagri dan Pemda	1. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Struktural dan Teknis. (KK.8.8)	9 NSPK	11 NSPK	9 NSPK	7 NSPK	5 NSPK	
		2. Jumlah modul Diklat diklat Struktural dan Teknis	25 modul	15 modul	18 modul	18 modul	15 modul	
		3. Jumlah angkatan Diklat Struktural dan Teknis	25 angkatan	30 angkatan	35 angkatan	40 angkatan	45 angkatan	
		4. Persentase kualitas penyelenggaraan diklat Struktural dan Teknis	-	70%	75%	80%	85%	
		5. Jumlah angkatan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	5 angkatan	5 angkatan	5 angkatan	5 angkatan	5 angkatan	
		6. Jumlah dokumen hasil Fasilitas Pusat Diklat Struktural dan Teknis	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		7. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi	-	-	3 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	
5. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan penyelenggaraan kediklatan Jabatan Fungsional serta standardisasi diklat	1. Jumlah naskah Grand Strategy penyelenggaraan Diklat (PB)	1 Naskah	-	-	-	-	PUSAT DIKLAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN STANDARDISASI DIKLAT
		2. Jumlah laporan hasil sosialisasi Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat (PB)	-	1 laporan	-	-	-	
		3. Jumlah Daerah Pelaksanaan Grand Strategy Penyelenggaraan Diklat (PB)	-	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	
		4. Jumlah Norma, Standar, Prose-dur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat (KK.8.8)	9 NSPK	11 NSPK	9 NSPK	10 NSPK	5 NSPK	
		5. Jumlah modul Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	15 modul	11 modul	14 modul	14 modul	11 modul	
		6. Jumlah angkatan Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	12 angkatan	12 angkatan	12 angkatan	12 angkatan	12 angkatan	
		7. Persentase kualitas penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	-	70%	75%	80%	85%	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (5)	
6. Pendidikan dan Pelatihan Regional	Pemberian layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada Pusat Diklat kemendagri Regional serta peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pusat Diklat Kemendagri	8. Jumlah Naskah Desain Sistem Diklat yang Berbasis Kompetensi	10 Naskah	22 Naskah	3 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	PUSAT DIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL
		9. Jumlah tenaga penyusun standar dan asesor kompetensi	100 orang	200 orang	275 orang	350 orang	400 orang (k)	
		10. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga Diklat (KK.8.7)	22 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	34 Jabatan	
		1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	
		2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	100% dokumen per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% dokumen per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% dokumen per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% dokumen per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% dokumen per Pusat Diklat Regional Kemendagri	
		3. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	
		4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan dukungan teknis pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	100% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	PUSAT DIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL
		5. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	60% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	70% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	80% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	85% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	90% per Pusat Diklat Regional Kemendagri	
		6. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional (KK.8.8)	1 NSPK per psat Diklat Regional Kemendagri	1 NSPK per psat Diklat Regional Kemendagri	1 NSPK per psat Diklat Regional Kemendagri	1 NSPK per psat Diklat Regional Kemendagri	1 NSPK per psat Diklat Regional Kemendagri	

PROGRAM/KEGIATAN (1)	OUTPUT/OUTCOME (2)	INDIKATOR (3)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA (6)
			2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (5)	
		7. Jumlah modul Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional	1 modul per Pusat Diklat Kemendagri Regional	
		8. Jumlah angkatan Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	5 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional	6 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional	6 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional	7 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional	7 angkatan per Pusat Diklat Kemendagri Regional	
		9. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Program Rumpun Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	2 dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional	2 dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional	2 dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional	2 dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional	2 dokumen per Pusat Diklat Kemendagri Regional	
		10. Persentase kualitas penyelenggaraan Diklat pada Pusat Diklat Kemendagri Regional	-	70% per Pusat Diklat Kemendagri Regional	75% per Pusat Diklat Kemendagri Regional	80% per Pusat Diklat Kemendagri Regional	85% per Pusat Diklat Kemendagri Regional	

II. KEBUTUHAN PENDANAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A. DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.	PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	105.500	139.004	187.421,8	206.848	231.131
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik	48.945	27.250	30.521,8	35.513	40.997
b.	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7.476	16.630	31.000	33.390	36.060
c.	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	12.336	13.150	22.850	17.460	17.861
d.	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	12.534	34.365	41.900	43.280	44.119
e.	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	11.476	38.109	44.250	52.570	47.495
f.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	12.732	9.500	16.900	17.460	17.861
B. DITJEN PEMERINTAHAN UMUM						
2.	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	285.460	202.565	479.556,5	670.951	682.384,2
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	32.580	34.878	46.721,6	47.000	54.000
b.	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	19.000	22.800	265.020	394.681,7	396.181,7
c.	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	189.720	67.728,8	89.094,9	123.200	126.900
d.	Pembinaan Ketenteraman, Kertertiban dan Perlindungan Masyarakat	8.210	11.500	16.950	21.700	23.700
e.	Pengembangan Kawasan dan Otorita	7.500	16.500	20.800	23.200	21.800

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	f. Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	28.450	49.158,2	40.970	61.169,3	59.805,5
C.	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
3.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	699.042	2.276.214	4.624.007,4	300.973	115.973
	a. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan	53.883	55.311,2	46.147,5	60.954	61.273
	b. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	9.067	9.998,4	6.849	12.048	9.500
	c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	5.686	6.791,1	9.000	8.417	7.000
	d. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.808	25.924	20.537	40.711	30.000
	e. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	598.009	2.468.020	4.531.569,9	166.628	-
	f. Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan	3.483	7.188,1	4.807	5.948	4.000
	g. Perencanaan Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan	4.105	5.179,2	5.097	6.267	4.200
D.	DITJEN OTONOMI DAERAH					
4.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	138.422,7	265.804,4	131.570	119.473,7	129.544,3
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah	28.816	40.134	49.077	49.077	51.077
	b. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I	41.845,7	25.799,5	11.271,5	13.138	15.390
	c. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD	18.269,7	55.101	31.750	17.078,7	17.865
	d. Fasilitas KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	12.249,6	15.063	11.000	11.688	12.917,3
	e. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	33.646,6	115.500,4	17.200	15.358	16.905
	f. Penataan Urusan Pemerintah Daerah Lingkup II	3.952,1	14.206,5	11.271,5	13.136	15.390

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
E. DITJEN KEUANGAN DAERAH						
5.	PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	66.521	61.100	86.304,6	94.935,06	104.428,57
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	24.691	27.120	31.714,6	37.935,06	41.428,57
b.	Pembinaan Anggaran Daerah	9.009	9.400	11.000	15.000	16.500
c.	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	12.791	10.000	13.250	16.500	18.000
d.	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	7.873	6.500	14.502	12.000	13.500
e.	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	12.157	8.080	15.838	13.500	15.000
F. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH						
6.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH	397.406	235.832,2	483.297,5	499.455	529.419
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	236.423	92.472	217.726,5	225.005,5	238.505
b.	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.650	11.511	12.473	12.890	13.663
c.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	116.763	63.445,2	88.683	91.647,8	97.146
d.	Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	9.040	20.342	42.125	43.533,3	46.145
e.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan	14.480	22.773	34.139	35.280,4	37.397
f.	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	12.050	25.289	88.151	91.098	96.563

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
G. DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	10.184.431	10.033.400	11.028.389	9.633.900	9.644.900
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	115.015	80.500	91.212,2	124.190	136.190
b.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	26.954	36.900	45.680	377.900	345.900
c.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	52.762	30.000	65.000	230.840	228.400
d.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	9.834.007	9.583.000	10.088.265,7	7.790.220	7.656.210
e.	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	43.327	30.300	450.001,1	487.250	487.250
f.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	54.061	87.500	90.000	295.400	422.850
g.	Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	30.889	155.800	162.950	250.700	290.700
h.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional	27.417	29.400	35.280	77.400	77.400
H. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI						
8.	PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN	182.198	269.466	318.041,1	356.536	392.066
a.	Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan	26.863	35.680,7	47.282,3	49.394	59.810
b.	Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan	107.253	183.230	166.075,8	190.432	209.422
c.	Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan, dan Kemahasiswaan	20.191	9.773,5	10.996	12.281	13.538
d.	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	27.891	40.781,8	93.688	104.429	114.776

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I. INSPEKTORAT JENDERAL						
9.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	43.903	43.835,8	52.499,5	52.424	55.776
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	27.975	26.924,3	32.137,5	28.760	30.610
	b. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I	3.340	4.031	4.782	5.128	5.685
	c. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II	3.358	3.309,7	4.124	5.332	5.349
	d. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III	3.049	3.236,6	3.870	4.685	4.677
	e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV	3.190	3.425,4	4.241	4.672	5.031
	f. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus	2.991	2.908,8	3.345	3.847	4.424
J. SEKRETARIAT JENDERAL						
10.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	164.966	217.065	243.295,3	240.198	253.554
	a. Perencanaan Program dan Anggaran	14.893	16.386,1	18.000	19.638	21.615
	b. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan	42.847	45.200,6	55.298,4	59.169	63.311
	c. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	6.946	9.675	10.500	12.192	12.797
	d. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	6.300	9.056	10.500	12.119	12.645
	e. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	9.049	8.562	8.500	8.701	9.008
	f. Pengkajian Kebijakan Strategik	6.500	8.577,8	9.500	10.135	10.813

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	g. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	5.070	5.960	25.500	7.989	8.510
	h. Pengelolaan Penerangan	6.258	6.350	7.500	7.989	8.511
	i. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	19.055	18.335,3	18.270,1	19.228	20.191
	j. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	48.047	88.962,3	79.726,8	83.038	86.153
11.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	485.000	519.482	116.057,6	418.630	189.692
	a. Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	485.000	519.482	116.057,6	418.630	189.692
	K. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
12.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	30.245	35.101,8	55.337,5	60.871,25	70.001,938
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan	19.495	22.101,8	38.837,5	42.721,25	49.129,438
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan	2.150	3.250	4.125	4.537,5	5.218,125
	c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otda	4.300	3.250	4.125	4.537,5	5.218,125
	d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah	2.150	3.250	4.125	4.537,5	5.218,125
	e. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	2.150	3.250	4.125	4.537,5	5.218,125

(Dalam Juta Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
L. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
13.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131.633	153.727,1	186.187,5	275.133,2	275.153
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan	38.117	37.062,8	68.609,8	131.371	139.155
b.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan daerah	12.129	21.902,4	17.647,1	24.821	32.740
c.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	4.100	15.187,2	12.157,9	13.462	14.797
d.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis	4.757	9.820,5	12.725,2	13.861	14.999
e.	Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	3.530	5.930,2	10.857,5	11.010	12.099
f.	Pendidikan dan Pelatihan Regional	69.001	63.824	64.190	80.609	61.364
T O T A L		12.914.727,70	14.452.597,30	17.991.965,30	12.930.328,21	12.674.023,01

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

GUMAWAN FAUZI